LAPORAN TAHUNAN

PERUMDA BPR KUNINGAN

TAHUN 2024

PERUMDA BPR KUNINGAN

Kantor Pusat : Jalan Jenderal Sudirman No 88 Kuningan Telp./Fax. (0232) 8880207

DAFTAR ISI

			Halaman
DAFTAR ISI			i
DAFTAR LAMPIRAN			ii
BAB I		**PENDAHULUAN**	1
BAB II		**INFORMASI UMUM**	2
	1	SUSUNAN KEPENGURUSAN	2
	2	KOMPOSISI KEPEMILIKAN	3
	3	PERKEMBANGAN USAHA	3
	4	STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN	6
		STRATEGI MANAJEMEN	6
		KEBIJAKAN MANAJEMEN	9
	5	LAPORAN MANAJEMEN DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE	12
BAB III		**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK**	**20**
BAB IV		**PENGUNGKAPAN (DISCLOUSURE)**	**21**
	A	IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
	B	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	21
	C	KOMITMEN DAN KONTIJENSI	32
BAB V		**SURAT KOMENTAR ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**	**34**
BAB VI		**PENUTUP**	**35**

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI TAHUN 2024

LAMPIRAN II BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN III RINCIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN IV LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2017 AUDITTED

LAMPIRAN V MANAGEMENT LETTER ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kinerja BPR dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi umum. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPR yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan (PERUMDA BPR) Kuningan yang merupakan salah satu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang bergerak dibidang jasa perbankan setiap tahunnya wajib menyampaikan laporan tahunan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan :

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan Tahunan tahun buku 2024 disusun berdasarkan laporan perkembangan usaha (kinerja) selama tahun 2024, serta dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap usaha PERUMDA BPR Kuningan selama satu tahun. Laporan keuangan tahunan ini telah di audit oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati, dengan hasil audit telah disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tanggal 07 Februari 2024 dan disampaikan kepada pemilik dalam RUPS yang telah dilaksanakan dan disahkan oleh Bupati Kuningan pada tanggal 14 Februari 2025.

BAB II
INFORMASI UMUM

1. SUSUNAN KEPENGURUSAN

PERUMDA BPR Kuningan adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan pengurus yang terdiri dari Dewan Pengawas, Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan susunan sebagai berikut :

1) Dewan Pengawas

- Ketua Dewan Pengawas : Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM.
- Anggota Dewan Pengawas : Drs. H. Uca Somantri, M.Si.

2) Direksi

- Direktur Utama : Dodo Warda, SE., MM.
- Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Deni Heryana, S Sos

3) Pejabat Eksekutif

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Resiko, Penanggung Jawab APU dan PPT : Adih Setiadi
- Pejabat Eksekutif Audit Intern : Henda Hendrayana, SE.
- Kepala Bagian Umum SDM dan Anggaran : Ulan, SE
- Kepala Bagian Pemasaran : Juju Juherman, SE
- Kepala Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Pelaporan : Ii Maret Giwa
- Kepala Cabang Utama : Arief Komara, SE.
- Kepala Cabang Kadugede : Rika Farliani, M Si
- Kepala Cabang Cidahu : Andriyanto Surya Kusuma, SE
- Kepala Cabang Ciawigebang : Ucu Kristianto, SE.
- Kepala Cabang Lebakwangi : Lukman Salim, S.Ag.
- Kepala Cabang Mandirancan : Muhamad, SE.
- Kepala Cabang Garawangi : Ria Putriyani, SE.

2. KOMPOSISI KEPEMILIKAN

Pemegang saham PERUMDA BPR adalah pemegang saham tunggal yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sehingga komposisi kepemilikannya adalah 100 % (seratus persen) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2024 modal yang sudah disetor oleh pemilik sebesar Rp. 20.882.446.303,00, masih terdapat kekurangan modal disetor sebesar Rp. 29.117553.697,00, kekurangan tersebut akan disetor oleh pemilik secara bertahap sampai modal disetor telah sesuai dengan jumlah modal dasar perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan.

3. PERKEMBANGAN USAHA

a. Riwayat ringkas PERUMDA BPR Kuningan

BPR Kuningan adalah salah satu BUMD di Kabupaten Kuningan yang bergerak dalam bidang Perbankan. Berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No.19 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kuningan dan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.7/6/KEP.DpG/2005 Tentang Pemberian izin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR Kadugede, PD. BPR Cidahu, PD. BPR Ciawigebang, PD. BPR Lebakwangi, PD. BPR Garawangi, PD. BPR Mandirancan dan mulai melakukan operasional pada tanggal 23 November 2005.

Perubahan badan hukum PD. BPR Kuningan menjadi PERUMDA BPR Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Kuningan tanggal 1 Maret 2019, dan tertuang dalam Berita Acara Perubahan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kuningan Hasil Merger Menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PERUMDA BPR) Kuningan dengan Akta Notaris Nomor 42 Tahun 2019.

Dalam menjalankan kegiatan usaha PERUMDA BPR Kuningan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan.

b. Ikhtisar Data Keuangan

- Selama tahun 2024 Pendapatan operasional sebesar Rp. 45.035.763.054,00 sedangkan beban operasional sebesar Rp. 40.512.410.222,00 sehingga laba operasional BPR sebesar Rp. 4.523.352.832,00.
- Selama tahun 2024 Pendapatan non operasional sebesar Rp.1.327.921.092,00 dan beban non operasional sebesar Rp.2.086.005.428,00 sehingga rugi non operasional sebesar Rp.758.084.336,00.
- Selama tahun 2024 setelah seluruh pendapatan dikurangi dengan beban BPR Kuningan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp.3.765.268.497,00. Setelah dilakukan pemotongan PPh badan sebesar Rp. 1.095.967.128,00 diperoleh laba bersih sebesar Rp. 2.669.301.369,00.

Laporan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Tahun 2024 yang telah disahkan oleh pemilik pada saat RUPS terlampir.

c. Rasio Keuangan

Dari laporan keuangan tahun 2024 yang disampaikan oleh akuntan publik dan diterima BPR tanggal 10 Pebruari 2025 dapat kami simpulkan rasio keuangan sebagai berikut :

- Capital Adequaty Ratio (CAR) sebesar 16,91% ;
- Asset Quality / Kualitas Aktiva Produktif :
  - Rasio KAP sebesar 3,57% ;
  - Rasio PPAP terhadap PPAPWD sebesar 100,00 % ;
  - NPL Gross 4,30 %;
  - NPL Net 2,52 %.
- Earning / Rentabilitas :
  - Ratio Return On Asset sebesar 1,29 % ;
  - Ratio BOPO sebesar 89,96 % ;
  - Ratio NIM sebesar 10,95 %.
- Liquiditi / Likuiditas
  - Cash Ratio sebesar 13,45 % ;
  - Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 91,62 %

d. Perbandingan Jumlah Kredit Bermasalah.

Pada tahun 2024 jumlah nominal Non Performing Loans (NPL) sebesar Rp.9.420.814.188,00. Secara prosentase perbandingan antara jumlah Non Performing Loans terhadap total kredit yang diberikan sebesar 4,30%. Jika dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024 sebesar Rp. 10.433.158.968,00 dengan prosentase 4,77% realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp. 1.012.344.781,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2023 Rp. 7.512.619.346,00 nominal NPL mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.908.194.482,00. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Kredit dana talangan Dinas Instansi yang pada 2023 masih dalam kondisi Lancar tidak terselesaikan dan menjadi Macet di 2024;
2. Dampak dari adanya Kredit perangkat desa yang mengundurkan diri maupun di PHK tetapi masih belum terselesaikan dalam hal pembayaran Klaim dari pihak asuransi. Selain itu ada juga sisa dari pembayaran klaim asuransi yang masih tercatat di Nominatif;
3. Adanya pengaruh faktor eksternal dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan tunda bayar TPP, dimana pembayaran TPP selama tahun 2024 tidak lancar, bahkan di akhir Desember 2024 masih terdapat tunda bayar selama 3x TPP yang secara otomatis berimbas kepada pembayaran angsuran kredit yang sumber pembayarannya dari TPP.

e. Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan

Perkembangan usaha yang berpengaruh secara signifikan terhadap BPR Kuningan pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan RBB 2024 adalah :

1. Tidak tercapainya Pendapatan Operasional sebesar Rp. 2.932.464.484,00 yang semula direncanakan sebesar Rp. 47.968.227.539,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 45.033.578.307,00. Hal tersebut diakibatkan oleh :
   - Tidak tercapainya realisasi kredit sebesar 13 Milyard yang semula di targetkan 152 Milyard sedangkan realisasinya sebesar 139 Milyard yang mengakibatkan rencana pendapatan bunga kredit tidak tercapai.
   - Pengaruh kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal tunda bayar Pinjaman yang bersumber dari Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

- Penerimaan hapusbuku tidak tercapai sebesar Rp. 520.335.983,00 salah satunya disebabkan oleh belum terbentuknya tim penanganan hapus buku.

2. Beban Non Operasional semula direncanakan sebesar Rp. 1.348.149.674,00 realisasinya sebesar Rp. 2.086.005.428,00 sehingga terjadi inefisiensi sebesar Rp.737.855.753,00 hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya kekurangan pembayaran pokok dan denda pajak setelah dilakukan Pemerikasaan Pajak oleh Kantor Pajak Pratama tahun buku 2018 dan 2021.

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

STRATEGI MANAJEMEN

Kepemilikan PERUMDA BPR Kuningan sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan merupakan satu kekuatan dan peluang yang harus dimanfaatkan oleh Pengurus. Karena dukungan kuat dari pemilik untuk menambah modal dan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam membantu program kerja untuk pengembangan BPR serta sinergi dengan instansi pemerintah dapat dijadikan peluang untuk penghimpunan dana. Bertolak pada hal diatas yang merupakan pandangan strategis dalam menggapai peluang jangka panjang, diperlukan analisis SWOT (kondisi Internal = SW dan kondisi External = OT) sebagai berikut:

1. Kondisi Internal (S & W)

- Strength (Kekuatan)
  - ✓ Bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan Dasar hukum yang digunakan Peraturan Daerah
  - ✓ Dukungan kuat dari pemilik (PERUMDA BPR Kuningan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan) untuk menambah modal
  - ✓ Telah dibuat Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Petunjuk Teknis Kepegawaian.
  - ✓ Dukungan kuat dari beberapa deposan corporate untuk menjadi deposan tetap.
  - ✓ Memiliki sinergi yang baik dengan instansi pemerintah
  - ✓ Adanya jaringan atau hubungan dengan berbagai bank umum untuk mempermudah menerima setoran dari nasabah.

- ✓ Beragamnya jenis tabungan dan deposito serta kredit yang sifatnya fleksible sehingga memberikan keleluasaan nasabah untuk memilih.
- ✓ Bunga kredit dan bunga simpanan kompetitif.
- ✓ PERUMDA BPR Kuningan menjadi peserta program penjaminan simpanan
- ✓ Tersebarnya Kantor Cabang dan Kantor Kas sehingga bisa menjangkau pelayanan di setiap kecamatan
- ✓ Adanya sistem jemput bola dalam penghimpunan dana

- Weakness (Kelemahan)
  - ✓ Pemanfaatan Teknologi Informasi kurang maksimal akibat terbatasnya sarana dan SDM
  - ✓ Terbatasnya kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya manusia dalam bidang perbankan
  - ✓ Rendahnya produktifitas pegawai
  - ✓ Fasilitas Kerja belum memadai
  - ✓ Sistem dan pengawasan bank masih lemah
  - ✓ Masih kurangnya pemahaman pegawai terhadap uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang (job description).

2. *Kondisi External (O & T)*

- Opportunity (Peluang)
  - ✓ Kebijakan Pemerintah Daerah dalam membantu program kerja untuk pengembangan BPR
  - ✓ Dukungan dari SKPD dan Organisasi yang ada di Kuningan
  - ✓ Telah ditentukannya PERUMDA BPR Kuningan sebagai pengelola kas desa
  - ✓ Pangsa pasar masih terbuka
  - ✓ Masih banyak masyarakat atau sektor usaha kecil dan mikro yang belum tersentuh oleh bank.
  - ✓ Perhatian dan upaya pemerintah untuk meningkatkan peran UKM dalam perekonomian Indonesia masih tinggi.
  - ✓ Sektor ekonomi di Kuningan berkembang dengan baik
  - ✓ Tingginya animo masyarakat untuk memperoleh kredit dari bank.
  - ✓ Adanya peningkatan nilai penjaminan simpanan dari LPS
- Threat (Ancaman)

- ✓ Persaingan suku bunga dan pelayanan sesama BPR maupun lembaga keuangan mikro cukup tinggi dan cenderung meningkat.
- ✓ Bunga deposito yang diberikan Bank Umum hampir sama atau mendekati bunga di BPR.
- ✓ Pemberian fasilitas khusus bagi nasabah oleh bank pesaing
- ✓ Bertambahnya bank umum dan lembaga keuangan non bank yang membuka usaha di wilayah Kuningan dalam menggarap pangsa pasar BPR khususnya di bidang kredit.
- ✓ Bertambahnya kantor cabang dari BPR lain yang masuk ke wilayah Kuningan
- ✓ Adanya perubahan perilaku nasabah
- ✓ Pola hidup masyarakat cenderung konsumtif

Bertolak pada hasil analisis internal dan ekternal, maka strategi manajemen yang dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. *Strength (Kekuatan) dengan Opportunity (Peluang)*
   - Memperluas jangkauan pemasaran penghimpunan dan penyaluran dana dengan peluncuran mobil kantor kas keliling.
   - Mengembangkan organisasi pemasaran yang berkaitan dengan pencapaian target dana maupun kredit.
2. *Strength (Kekuatan) dengan Threat (Ancaman)*
   - Menyesuaikan tingkat bunga tabungan dan deposito dengan pesaing.
   - Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih unggul dari pesaing.
   - Memperbaiki dan mereview persyaratan kredit dan prosedur pemberian kredit yang dapat memperlambat pelayanan.
3. *Weakness (Kelemahan) dengan Opportunity (Peluang)*
   - Merubah struktur organisasi sehingga tidak ada perangkapan jabatan.
   - Memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang mendukung produktivitas kerja.
   - Mengaplikasikan, merespon, menindaklajuti serta memperbaikan atas berbagai temuan pemeriksanaan internal maupun dari OJK, Inspektorat dan Akuntan Publik.
   - Melakukan kegiatan promosi menggunakan sosial media, sehingga dapat lebih menjangkau masyarakat, terutama pengguna media sosial.

4. *Weakness (Kelemahan) dengan Threat (Ancaman)*
    - Mengoptimalkan kinerja karyawan dan memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan.
    - Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dari pesaing.
    - Memperingan persyaratan kredit dan mempercepat proses pemberian kredit.

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Untuk mewujudkan realisasi rencana kerja tahun 2024 yang berkaitan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pengembangan sumber daya manusia (pegawai), ditetapkan kebijakan manajemen sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai pemberian kredit bagi kepala desa mengacu kepada Peraturan Direksi No 02 TAHUN 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Ketentuan Kredit Bagi Kepala Desa Kabupaten Kuningan;
2. Ketentuan mengenai kredit siltap plus bagi perangkat desa yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 03 TAHUN 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Ketentuan Kredit Siltap Plus;
3. Ketentuan mengenai kredit sertifikasi yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 04 TAHUN 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Ketentuan Kredit Sertifikasi;
4. Ketentuan mengenai Literasi dan Inklusi Keuangan mengacu kepada Peraturan Direksi NO 05 TAHUN 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Literasi dan Inklusi Keuangan;
5. Ketentuan menganai Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 06 TAHUN 2024 tentang sistem prosedur pengembangan kualitas sumber daya manusia pada Perumda BPR Kuningan tanggal 29 April 2024;
6. Ketentuan yang mengatur terkait kepegawaian Perumda BPR Kuningan yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 07 TAHUN 2024 tentang ketentuan kepegawaian tanggal 31 Juli 2024;
7. Ketentuan mengenai tabungan Simarmas GO yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 08 TAHUN 2024 tentang kebijakan dan prosedur Tabungan Simarmas GO tanggal 08 Agustus 2024

8. Ketentuan mengenai perkreditan Perumd BPR Kuningan yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 09 TAHUN 2024 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan Perumda BPR Kuningan tanggal 30 Agustus 2024
9. Ketentuan mengenai kredit bagi pengurus yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 10 TAHUN 2024 tentang Ketentuan Kredit Kepada Pengurus Perumda BPR Kuningan tanggal 30 Agustus 2024
10. Ketentuan mengenai kredit bagi pegawai yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 11 TAHUN 2024 tentang Ketentuan Kredit Kepada Pegawai Perumda BPR Kuningan tanggal 30 Agustus 2024
11. Ketentuan mengenai pengaduan konsumen yang mengacu kepada Peraturan Direksi NO 12 TAHUN 2024 tentang Kebijakan dan Prosedur Layanan Pengaduan Konsumen Direksi Perumda BPR Kuningan tanggal 22 Oktober 2024
12. Peraturan Direksi NO 13 TAHUN 2024 tentang Standar Operasional Pengendalian Internal Integritas Pelaporan Keuangan Perumda BPR Kuningan tanggal 23 Desember 2024
13. Peraturan Direksi NO 14 TAHUN 2024 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud tanggal 24 Desember 2024
14. Mendukung penyelenggaraan LayananTransaksi Non Tunai bagi Pemerintah Desa pada Perumda BPR Kuningan dibuatkan Surat Keputusan Direksi No 02/KPTS.DIR/I/2024 tentang Penunjukan Petugas Layanan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Kabupaten Kuningan Tanggal 17 Januari 2024
15. Adanya pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan Perumda BPR Kuningan, program tersebut mengacu pada Surat Keputusan Direksi Perumda BPR Kuningan Nomor 19/KPTS-DIR/IV/2024 tentang Unit Kerja Literasi dan Inklusi Keuangan tanggal 30 April 2024.
16. Besarnya suku bunga tabungan pemerintah desa diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 20/KPTS-DIR/V/2024 tentang Ketentuan Suku Bunga Tabungan Pemerintah tanggal 22 Mei 2024;
17. Untuk mengimplementasikan penghimpunan dana dan penyaluran dana, dilakukan bauran pemasaran sebagai berikut :
    - Produk

      Dilakukan Segmentasi pasar yaitu Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan target lokasi Pasar Baru, Pasar Kepuh, Pasar

Kramatmulya, Pasar Darurat, Pasar Cilimus, Pasar Ciawigebang, Pasar Luragung, Pasar Darma, sekolah-sekolah dan instansi-instansi.

- Price

  Dengan menerapkan harga (credit rate) seimbang dengan pesaing (Harga Penetrasi), sedangkan untuk funding rate disesuaikan dengan jumlah nominal dan lama nya dana mengendap serta tingkat suku bunga LPS.

- Place

  Tempat (place) layanan yang diberikan untuk menerima setoran tabungan / angsuran kredit dapat melalui seluruh jaringan Kantor BPR Kuningan baik secara langsung datang ke kantor, mesin EDC yang dibawa petugas, atau transfer melalui Virtual Account dan Bank Umum. Sedangkan untuk penarikan tabungan hanya dapat dilakukan melalui seluruh jaringan Kantor BPR Kuningan. Untuk penyetoran deposito dan tabungan dapat dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha atau rumah nasabah (jemput bola).

- Promosi

  Lebih diutamakan dengan media personal selling (penjualan langsung) dan media sosial mass selling (iklan media social, radio, spanduk, brosur dan publisitas kegiatan olah raga atau kegiatan kemasyarakatan).

18. Mempedomani dan mengevaluasi tingkat penyimpangan dari Rencana Bisinis Bank (RBB) 2024 dalam pelaksanaan kegiatan operasional minimal 1 bulan sekali.
19. Pengelolaan Manajemen Resiko yang mencakup identifikasi dan pengendalian resiko

    - Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, penurunan keuntungan atau menyebabkan permasalahan BPR, dan sedikitnya melakukan analisis terhadap Karakteristik Risiko yang melekat pada BPR dan Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPR
    - Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas usaha Bank serta memastikan bahwa Risiko

dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan, dan harus disetujui oleh Direksi

- Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunakan BPR untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR yang dalam hal ini termasuk penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian

5. LAPORAN MANAJEMEN DALAM RANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan, bahwa Pengurus Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi yang dalam menjalankan usahanya dibantu oleh Pejabat Eksekutif dengan struktur organisasi sebagai berikut :

a. Struktur Organisasi

Struktur Kantor Pusat.

1. Dewan Pengawas
2. Direksi
3. Pejabat Eksekutif yang terdiri dari :
    1) Bagian Pemasaran
    2) Satuan Kerja Teknologi Informasi dan Pelaporan
    3) Bagian Umum SDM dan Anggaran
    4) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Resiko, Penanggungjawab APU dan PPT
    5) Pejabat Eksekutif Audit Intern
    6) Kepala Cabang

Struktur Kantor Cabang :

1. Kepala Cabang
2. Kepala Kantor Kas, Kasi Umum, Kasi Pemasaran dan staf pelaksana.

Bagan stuktur Organisasi selengkapnya terlampir.

b. Bidang Usaha / Aktivitas Utama

Aktivitas utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit yang diberikan, melakukan kerjasama dengan lembaga lain dan melakukan penempatan dana pada bank lain.

c. Teknologi Informasi

Untuk menunjang operasional PERUMDA BPR Kuningan dan pengembangan bisnis kedepan, Teknologi Informasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. PERUMDA BPR Kuningan merasa perlu untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada nasabah, pelaporan baik untuk internal BPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun stakeholder lainnya

PERUMDA BPR Kuningan melakukan kerjasama dengan penyedia jasa teknologi informasi Telkom Sigma yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 yang meliputi kerjasama di bidang Aplikasi inti Perbankan, Pusat Data, Pusat Pemulihan Bencana dan Penyelenggaraan Teknologi Informasi lainnya, dengan lama waktu perjanjian kerjasama 3 tahun sekali dan diperpanjang.

Aplikasi Inti Perbankan (*Core Banking System*) yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional adalah sistem aplikasi *Satu* dari Telkom Sigma dengan Pusat Data (*Data Center/server*) yang berlokasi di Surabaya dan Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia yang berlokasi di Gedung Germant Centre BSD Tanggerang.

BPR Kuningan merasa perlu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang berbasis teknologi informasi. Selain Aplikasi Inti Perbankan, system Satu telah menunjang setoran tabungan melalui transaksi Virtual Account (VA) melalui bank umum, aplikasi pembayaran diantaranya :

- Pembayaran tagihan listrik;
- Pembayaran tagihan Telpon dan Internet;
- Pembayaran tagihan BPJS Kesehatan;
- Pembayaran tagihan TV Berbayar dan
- Pembayaran tiket Kereta Api Indonesia (KAI).

Dan pembelian :

- Pembelian Pulsa dan Paket Data Internet;
- Pembelian Token Listrik;
- Pembelian uang elektronik (e-money) Dana, Gopay, Ovo, Shopee Pay dan LinkAja.

Sebagai bagian dari komitmen BPR untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan nasabah, BPR Kuningan sedang mengembangkan layanan dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking. Layanan mobile banking memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola rekening mereka secara mudah dan aman melalui perangkat seluler. Dengan menggunakan aplikasi mobile banking, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, memeriksa saldo, dan mengakses informasi perbankan lainnya, kapan pun dan di mana pun mereka berada. Layanan mobile banking merupakan langkah strategis BPR untuk menghadirkan solusi perbankan yang lebih inklusif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Dengan Sistem Aplikasi yang menggunakan Teknologi Informasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan performance BPR agar mampu dan memiliki kemampuan dalam persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat. BPR Kuningan telah menunjuk Kepala Satuan Kerja sebagai pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Teknologi Informasi.

d. Perkembangan dan Target Pasar

- **Total Asset**

  Asset tahun 2024 mencapai Rp. 250.226.786.755,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 619.488.557,00 (naik 0,25 %) dari tahun 2023 yang mencapai asset Rp. 249.607.298.198,00.

- **Kredit Yang Diberikan**

  Kredit yang diberikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 218.875.457.158,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 207.955.513.136,00, hal ini menunjukan adanya kenaikan sebesar Rp. 10.919.944.021,00 atau naik 5,25%.

  Apabila dibandingkan dengan RBB tahun 2024, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 218.886.973.305,00, terdapat kekurangan dalam pencapaian target sebesar Rp. 11.516.148,00 atau hanya mencapai target sebesar 99,99%. Hal itu disebabkan karena pengajuan kredit di tahun 2024 didominasi oleh nasabah lama yang melakukan top up, dan tidak tercapainya target pencairan/realisasi kredit.

- **Dana Pihak Ketiga**

  Tabungan :

  Tabungan pada tahun 2024 sebesar Rp. 111.676.482.390,00, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 102.312.194.819,00, hal ini menunjukan adanya peningkatan sebesar Rp. 9.364.287.571,00 atau meningkat sebesar 9,15%.

  Apabila dibandingkan dengan RBB tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 114.133.579.710,00, terdapat ketidak tercapaian target sebesar Rp.2.457.097.320,00 atau pencapaian hanya sebesar 97,85 %. Adanya ketidaktercapaian tersebut salah satunya disebabkan masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan dana dalam bentuk deposito yang memberikan bunga lebih besar dibanding bunga tabungan.

  Deposito :

  Deposito pada tahun 2023 sebesar Rp. 59.791.850.000,00, bila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.463.900.000,00 atau naik sebesar 10,81% , dimana pada tahun 2024 saldo deposito sebesar Rp.66.255.750.000,00.

Berdasarkan RBB tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.61.831.500.000,00, terdapat pelampauan target sebesar Rp.4.424250.000,00 atau dengan persentase pencapaian sebesar 107,16%.

e. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Pada saat mulai operasional PERUMDA BPR Kuningan mempunyai 7 Kantor Cabang, tetapi seiring dengan perkembangan perusahaan PERUMDA BPR Kuningan telah mempunyai jaringan kantor sebanyak 13 kantor yaitu 7 Kantor Cabang dan 6 Kantor Kas dan berkantor Pusat di Jalan Jendral Sudirman No. 88 Kuningan dengan lokasi sebagai berikut :

Alamat Kantor Cabang :

1. **Kantor Cabang Utama,** alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 88 Kuningan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kuningan, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Jalaksana dan Kecamatan Japara;
2. **Kantor Cabang Kadugede**, alamat Jl. Raya Kadugede Kuningan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kadugede, Kecamatan Darma, Kecamatan Nusaherang;
3. **Kantor Cabang Cidahu**, alamat Jl. Raya Cidahu No. 52 Kuningan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Kalimanggis;
4. **Kantor Cabang Ciawigebang**, alamat Komplek Terminal Ciawigebang No. 52 Kuningan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciawigebang dan Kecamatan Cipicung;
5. **Kantor Cabang Lebakwangi**, alamat Jl. Raya Lebakwangi No. 76 Kuningan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Maleber;
6. **Kantor Cabang Mandirancan**, alamat Komplek Terminal Pasar Pancur Mandirancan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Pasawahan dan Kecamatan Pancalang;
7. **Kantor Cabang Garawangi**, alamat Jl. Raya Garawangi No. 12, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Garawangi dan Kecamatan Sindangagung;

Alamat kantor kas :

1. **Kantor Kas Ciniru (menginduk ke Kantor Cabang Garawangi)** , alamat Blok Pasar Ciniru, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciniru dan Kecamatan Hantara;
2. **Kantor Kas Luragung (menginduk ke Kantor Cabang Cidahu)**, alamat Jl. Raya Luragung, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cimahi;
3. **Kantor Kas Cibingbin (menginduk ke Kantor Cabang Cidahu)**, alamat Komplek Kantor Kecamatan Cibingbin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cibeureum dan Kecamatan Cibingbin;
4. **Kantor Kas Ciwaru (menginduk ke Kantor Cabang Lebakwangi)**, alamat Jl. Raya Ciwaru Blok Sukajaya, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciwaru dan Kecamatan Karangkancana;
5. **Kantor Kas Cilimus (menginduk ke Kantor Cabang Mandirancan)**, alamat Komplek Kantor Kecamatan Cilimus, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cigandamekar dan Kecamatan Cilimus.
6. **Kantor Kas Kutawaringin (menginduk ke Kantor Cabang Kadugede)**, alamat Komplek Pasar Desa Kutawaringin Kecamatan Selajambe, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Selajambe, Kecamatan Cilebak dan Kecamatan Subang.

f. Kerjasama dengan Lembaga lain

PERUMDA BPR Kuningan merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan jangkauan meliputi seluruh pelosok yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan yang tujuan nya membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha yang pada ahirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut.

Dalam menjalankan usahanya PERUMDA BPR Kuningan telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dan Bank- bank lain dalam bentuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit, antara lain Instansi pendidikan, SKPD, Organisasi Masyarakat dan UPK sebagai pengelola keuangan dari eks program PNPM Mandiri perdesaan. Dalam menempatkan dana untuk menjaga kebutuhan likuiditas, PERUMDA BPR Kuningan bekerjasama dengan BJB, BJB Syariah, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank

Danamon dan Bank Muamalat. Dalam menjalankan kerjasama tersebut selama ini tidak diperoleh kendala yang cukup berarti. Mulai tahun 2015 BPR Kuningan juga ditunjuk sebagai Kas Desa oleh Pemerintah Daerah Kuningan dan sebagai bank yang membantu pendistribusian dana ADD dan DD.

Sehingga dari kerjasama tersebut penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit meningkat setiap tahunnya.

g. Kepemilikan

Karena PERUMDA BPR Kuningan adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merupakan pemegang saham tunggal sehingga komposisi kepemilikannya adalah 100 % (seratus persen) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Sampai dengan bulan Desember tahun 2024 modal yang sudah dibukukan dan sudah disetujui OJK sebesar Rp. 20.882.446.303,00.

h. Hubungan Keterkaitan

Karena PERUMDA BPR Kuningan merupakan perusahaan yang kepemilikannya 100% milik Pemerintah Kabupaten Kuningan dan tidak mempunyai anak perusahaan, maka tidak ada keterkaitan antar pemilik. Demikian juga antar pengurus maupun antara pemilik dan pengurus tidak ada keterkaitan.

i. Sumber Daya Manusia.

Pegawai PERUMDA BPR Kuningan sampai dengan tahun 2024 berjumlah 97 orang terdiri dari 83 (Delapan puluh tiga) orang pegawai tetap dan 14 (empat belas) orang pegawai kontrak, dengan latar pendidikan SLTA sebanyak 28 (Dua puluh delapan) orang, D3 sebanyak 7 (Tujuh) orang, S1 sebanyak 60 (Enam puluh) orang dan S2 sebanyak 2 (Dua) orang.

Pada tahun 2024 Pengurus dan pegawai telah diikut sertakan dalam berbagai macam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan / kompetensi dan wawasan di bidang perbankan. Jenis pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti terlampir.

j. **Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.**

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lainnya, telah ditetapkan berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 584.3/KPTS.408 BPR/2020 Tentang Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Kuningan tanggal 9 Juli 2020;
2. Keputusan Direksi Nomor 12/KEP.DIR/III/2024 Tentang Penggunaan Dana Kesejahteraan Dari Laba Bersih Tahun 2023, tanggal 06 Maret 2024.
3. Keputusan Direksi Nomor 14/KEP.DIR/III/2024 Tentang Penggunaan Tantiem Dari Laba Bersih Tahun 2023, tanggal 06 Maret 2024;
4. Keputusan Direksi Nomor 17/KEP.DIR/III/2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Bagi Pengurus, Pegawai, Calon Pegawai dan Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan, tanggal 26 Maret 2024;
5. Keputusan Direksi Nomor 21/KEP.DIR/VI/2024 Tentang Pemberian Gaji 13 Bagi Pengurus, Pegawai, Calon Pegawai dan Tenaga Harian Lepas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan, tanggal 4 Juni 2024;

k. Perubahan Penting yang terjadi di tahun 2024

Di tahun 2024 tidak ada perubahan penting yang terjadi di PERUMDA BPR Kuningan yang mempengaruhi kegiatan operasional.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN DAN OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan yang disusun untuk satu tahun buku dan disajikan dengan perbandingan satu tahun buku sebelumnya. Laporan keuangan tahunan yang disampaikan adalah laporan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati. Selengkapnya Laporan Keuangan Tahunan tahun 2024 auditted terlampir.

Dari hasil laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit tersebut diperoleh opini dari Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati adalah “wajar” dan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

BAB IV
PENGUNGKAPAN (DISCLOUSURE)

Pengungkapan (disclosure) dalam Laporan Tahunan ini adalah untuk memenuhi aspek transparansi yang mencakup:

a. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Penyajian laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010. Dasar pengukuran dan penyusunan Laporan Keuangan yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar dan diakui secara akrual. Tujuan dari Laporan Keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya yang mengacu kepada ketentuan dari Bank Indonesia, OJK, SAK ETAP maupun ketentuan lainnya.

b. Penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan

Penjelasan pos-pos Neraca bagian Asset adalah sebagai berikut :

- Kas sebesar Rp. 9.261.585.200,00 adalah saldo Kas Per 31 Desember 2024 yaitu uang tunai yang tersedia di bank setelah konsolidasi dengan semua Kantor Cabang.
- Penempatan pada bank lain sebesar Rp. 23.936.958.897,00 adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR Per 31 Desember 2024 dalam bentuk giro, tabungan dan deposito di Bank Umum/BPR lain. Bila dibandingkan tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp. 34.016.574.852,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 10.079.615.954,00. Hal ini terjadi karena di tahun 2024 terdapat pengambilan Simpanan Deposito dari BPR lain sebesar Rp. 14.300.000.000,00.

- Kredit yang diberikan sebesar Rp. 218.875.457.158,00 adalah saldo kredit yang diberikan per 31 Desember 2024 dari 5.132 debitur, dengan rincian berdasarkan kolektibilitas :
  - Lancar (L) Rp. 205.173.803.295
  - Dalam Perhatian Khusus Rp. 4.280.839.677
  - Kurang Lancar (KL) Rp. 656.389.047
  - Diragukan (D) Rp. 1.902.865.032
  - Macet (M) Rp. 6.861.560.107

  Bila dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah Rp. 207.955.513.138,00, terjadi pertumbuhan sebesar Rp. 10.919.944.01900 atau tumbuh sebesar 5,25%. Hal ini menunjukan bahwa pasar kredit belum jenuh dan masih terbuka untuk perluasan pasar.
- Provisi kredit sebesar Rp. 2.388.565.910,00 adalah saldo provisi yang belum diamortisasi yang didapat dari setiap plafond kredit dikali 1% sampai dengan 3% yang pengakuan pendapatannya di amortisasi sesuai dengan jangka waktu kredit.
- Penyisihan penghapusan aset produktif sebesar Rp. 5.020.517.847,00 adalah penyisihan cadangan kerugian yang sudah dibentuk dari kredit yang diberikan dengan perhitungan :
  - 0,5% dari kredit Lancar.
  - 3% dari kredit Dalam Perhatian Khusus.
  - 10% dari kredit Kurang Lancar.
  - 50% dari kredit Diragukan.
  - 100% dari kredit Macet.

  Selain kredit Lancar, perhitungan cadangan didapat dari nilai saldo kredit dikurangi nilai agunan yang dapat diperhitungkan dikali prosentase perhitungan cadangan.
- Asset tetap & inventaris sebesar Rp. 12.682.108.089,00 adalah Nilai perolehan Aset yang terdiri dari Tanah, gedung dan inventaris Per 31 Desember 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat pertumbuhan sebesar Rp.361.619.646,00 atau tumbuh 2,94%. Hal ini disebabkan karena terdapat pembelian aset inventaris di tahun 2024.

- Akumulasi aset tetap & inventaris sebesar Rp. 7.640.127.087,00 adalah penyusutan yang sudah dilakukan sejak aset tersebut diperoleh. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat pertumbuhan sebesar Rp.1.140.216.711,00 atau tumbuh sebesar 17,54%.
- Aset tidak berwujud sebesar Rp. 323.815.238,00 adalah nilai pembelian lisensi sofware windows untuk 60 komputer dan aplikasi lainnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, tidak terdapat perubahan nilai.
- Akumulasi aset tidak berwujud sebesar Rp. 238.480.022,00 adalah amortisasi yang sudah dilakukan untuk lisensi sofware sejak mulai dibeli.
- Aset lain-lain sebesar Rp. 2.670.223.652,00 adalah aset yang terdiri dari pendapatan bunga yang akan diterima (PYAD), premi asuransi, biaya dibayar dimuka dan piutang asuransi kredit. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp. 13.520.358,00.

Penjelasan pos-pos Neraca Liabilitas adalah sebagai berikut :

- Kewajiban segera sebesar Rp. 721.508.115,00 adalah saldo kewajiban segera dibayar Per 31 Desember 2024 yang terdiri dari titipan pajak, titipan asuransi, dan titipan nasabah. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.110.822.492,00 atau sebesar 13,31%.
- Tabungan sebesar Rp. 111.676.482.390,00 adalah simpanan masyarakat di BPR Kuningan yang terdiri dari 46.507 rekening penabung. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 9.364.287.571,00 atau sebesar 9,15%.
- Deposito berjangka sebesar Rp. 66.255.750.000,00 adalah simpanan deposito yang terdiri dari 852 rekening, dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan dengan suku bunga berkisar antara 4,5% setahun sampai 6,75% setahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 6.463.900.000,00 atau tumbuh sebesar 10,81.
- Simpanan dari Bank Lain sebesar Rp. 15.700.000.000,00 adalah penempatan dana dari BPR lain yang disimpan dalam bentuk rekening deposito berjangka 1 bulan sampai 6 bulan. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp. 14.300.000.000,00 atau turun sebesar 47,67%. Hal ini disebabkan karena di tahun 2024 BPR Kuningan simpanan masyarakat berupa

tabungan dan deposito meningkat sebesar Rp. 15.828.187.571,00 sehingga dana simpanan antar bank dengan bunga yang cukup tinggi dikembalikan.

- Pinjaman diterima sebesar Rp. 22.166.666.660,00 adalah sisa pokok pinjaman ke PT. BJB Cabang Kuningan. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 23.378.285.660,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 1.211.619.000,00 atau turun 5,18%.
- Kewajiban lain-lain sebesar Rp. 1.213.845.828,00 adalah kewajiban yang terdiri dari titipan bunga tabungan dan deposito accrual, titipan pajak badan, cadangan pensiun pegawai, titipan dana bergulir dan titipan lainnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 Rp. 1.447.232.734,00 terdapat penurunan sebesar Rp. 233.386.907,00 atau turun sebesar 16,13%.

Penjelasan pos-pos Neraca Ekuitas adalah sebagai berikut :

- Modal disetor sebesar Rp. 29.117.553.697,00 adalah jumlah modal yang telah disetorkan pemilik kepada perusahaan yang telah diakui oleh OJK sampai dengan Bulan Desember 2024 dari modal dasar perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Tidak terdapat perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2023.
- Modal sumbangan sebesar Rp. 116.601.094,00 adalah sumbangan modal dari pemilik pada masa BKPD.
- Cadangan umum sebesar Rp. 5.052.660.080,00 yaitu bagian laba yang disisihkan setiap tahun sejak tahun 2005 dengan maksud untuk menambah permodalan bank. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 256.532.098,00 atau tumbuh 5,35%. Hal ini disebabkan karena ada setoran cadangan umum di tahun 2024 sebesar 15% dari bagian laba tahun 2023.
- Cadangan tujuan sebesar Rp. 4.207.976.387,00 yaitu bagian laba yang disisihkan setiap tahun sejak tahun 2005 dengan maksud untuk tujuan tertentu. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 256.532.098,00 atau tumbuh 6,49%. Hal ini disebabkan karena ada setoran cadangan tujuan di tahun 2024 sebesar 15% dari bagian laba tahun 2023.

- Laba/Rugi tahun berjalan sebesar Rp. 2.669.301.369,00 adalah laba bersih yang dicapai oleh perusahaan di tahun 2024. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat pertumbuhan sebesar Rp. 103.980.393,00 atau tumbuh 4,05%.

Penjelasan pos laba / rugi :

- Pendapatan bunga sebesar Rp. 40.090.530.217,00 terdiri dari pendapatan bunga giro, tabungan dan deposito yang ditempatkan di BPR dan Bank Umum, pendapatan bunga kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, pendapatan amortisasi provisi dikurangi koreksi pendapatan bunga. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp. 314.978.814,00 atau turun sebesar 0,78%. Hal ini salah disebabkan tidak tercapainya realisasi pencairan kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,00, dan terjadi tunda bayar Tunjangan Perbaikan (TPP) Penghasilan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, sehingga debitur yang sumber pembayaran angsuran dari TPP tertunda.
- Pendapatan operasional lainnya sebesar Rp. 4.945.232.837,00 terdiri dari pendapatan dari kredit yang dihapus buku, pemulihan penyisihan aset produktif, pendapatan dari administrasi penutupan tabungan, denda kredit dll. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.2.208017.345,00 atau turun 30,87%. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan nominal NPL sehingga nilai pemulihan cadangan penghapusan aset produktif turun.
- Beban bunga sebesar Rp. 9.984.859.482,00 adalah bunga yang dibayarkan BPR kepada nasabah dalam bentuk bunga tabungan, bunga deposito serta bunga simpanan bank lain, bunga pinjaman yang diterima dan biaya transaksi deposito. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan/efisiensi sebesar Rp. 1.023.138.217,00 atau turun 9,29%. Hal paling signifikan disebabkan karena terdapat penurunan simpanan deposito dari BPR lain dan bunga pinjaman dari bank lain, sehingga biaya bunga simpanan dan pinjaman dari bank lain turun.
- Beban penyisihan penghapusan aset produktif sebesar Rp. 6.241.744.062,00 adalah beban penyisihan penghapusan penempatan dana tabungan dan deposito pada bank lain dan Beban penyisihan aset produktif kredit yang

diberikan. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp. 3.545.589.865,00 atau turun 36,23%.

- Beban pemasaran sebesar Rp. 5.482.658.552,00 adalah beban yang dikeluarkan untuk promosi, baik melalui personal selling maupun media mass selling. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.460.362.821,00 atau turun 32,44%.
- Beban administrasi dan umum sebesar Rp. 22.579.140.527,00 adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja, pendidikan & pelatihan, biaya pemeliharaan dan perbaikan inventaris kantor, pembelian barang dan jasa keperluan kantor, sewa gedung, biaya penyusutan aset tetap dan inventaris kantor, premi asuransi dan lain-lain. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.469.657.518,00 atau meningkat 6,96% yang disebabkan diantaranya karena ada kenaikan skala upah dan pembiayaan dana pensiun pegawai sehingga menyebabkan adanya kenaikan biaya gaji di tahun 2024 dan adanya kenaikan biaya barang dan jasa.
- Beban lainnya sebesar Rp. 735.369.210,00 adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya keagamaan, jamuan tamu, administrasi bank dll. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.675.920.224,00 atau turun 47,89%.
- Pendapatan Non Operasional sebesar Rp. 1.327.921.092,00 adalah pendapatan dari pendapatan ganti rugi asuransi, fee asuransi dan selisih kas. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.502.569.657,00 atau turun sebesar 27,46%. Hal ini disebabkan karena di tahun 2024 tidak terdapat penjualan aset tetap inventaris.
- Beban non operasional sebesar Rp. 2.086.005.428,00 adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan bank antara lain iuran asosiasi, biaya sumbangan dan biaya non operasional lainnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 954.122.806,00 atau naik sebesar 84,30%. Hal ini disebabkan oleh terjadinya kekurangan pembayaran pajak pada tahun-tahun sebelumnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pajak Pratama.

Penjelasan Laporan arus kas

- Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas investasi (investing) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum. Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.
- Dasar pengaturan Laporan Arus Kas yaitu :
  a. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (SAK ETAP paragraf 7.3)
  b. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. (SAK ETAP paragraf 7.7)
  c. Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak:
     ✓ perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan
     ✓ pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan
     ✓ semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan
     (SAK ETAP paragraf 7.8)
  d. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan

pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. (SAK ETAP paragraf 7.9)

e. Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. (SAK ETAP paragraf 7.10)
f. Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan. (SAK ETAP paragraf 7.13)
g. Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca. (SAK ETAP paragraf 7.16)

- BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan bisnis BPR tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan BPR serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Suatu transaksi tertentu dapat meliputi arus kas yang diklasifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas. Pelunasan pinjaman dari debitur berupa bunga dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi dan pokok pinjaman merupakan unsur yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya BPR dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi BPR, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi

terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan BPR. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud untuk membantu para pengguna laporan arus kas dalam menilai kemampuan BPR membayar dividen dari arus kas operasi. Beban pajak penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasikan dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya sehingga pajak penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Namun demikian, biasanya pajak yang dibayar diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Tetapi apabila arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Apabila arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

Di tahun 2024 terdapat kenaikan arus kas sebesar Rp. 1.870.232.200,00 yang di dapat dari peningkatan dari Aktivitas operasi sebesar Rp. 5.512.952.583,00, penurunan dari Aktivitas Investasi sebesar Rp. 361.619.646,00, penurunan dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp. 3.281.100.737,00 dengan saldo awal kas dan setara kas sebesar Rp. 7.391.353.000,00.

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan perubahan ekuitas BPR yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan BPR selama periode pelaporan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan:

- laba atau rugi untuk periode pelaporan;
- pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

- untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9: Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;
- untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:
  a. laba atau rugi;
  b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;
  c. jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas.

Saldo awal modal BPR tahun 2023 adalah Rp. 32.311.940.644,00, dengan keadaan di tahun 2024 BPR membukukan laba bersih Rp. 2.669.301.370,00 maka terjadi perubahan modal sebesar Rp. 617.044.590,00, sehingga saldo modal per 31 Desember 2024 menjadi Rp. 32.928.985.234,00.

Transaksi hubungan istimewa

Dalam kegiatan usahanya, bank melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah :

a. Pemegang saham 10% atau lebih dari modal disetor bank
b. Anggota Dewan Komisaris
c. Anggota Dewan Direksi
d. Keluarga dari pihak-pihak huruf a sd c
e. Pejabat bank lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif
f. Kepemilikan saham baik individu maupun keseluruhan lebih dari 25% modal disetor bank

BPR Kuningan tidak mempunyai anak perusahaan atau pemilik dari BPR Kuningan tidak memiliki anak perusahaan, sehingga tidak ada pinjaman yang difasilitasi untuk itu. Adapun pinjaman yang diberikan kepada Pengurus dan Pejabat Eksekutif, perlakuannya sama dengan yang diberikan kepada seluruh pegawai BPR Kuningan, yaitu sumber pembayarannya dari gaji dan dilakukan pemotongan pada saat pembayaran gaji, sehingga tidak dikatagorikan sebagai pihak terkait.

Sedangkan dari segi simpanan, jumlah transaksi hubungan istimewa (pihak terkait) sebanyak 117 rekening tabungan dengan nominal Rp. 323.188.115,00 dengan prosentase terhadap total tabungan 0,29%, dan 9 rekening deposito dengan nominal Rp. 465.000.000,00 dengan prosentase terhadap total deposito 0,70% dan prosentase terhadap total aset sebesar 0,31%. Untuk simpanan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur transaksi hubungan istimewa.

Selain transaksi dari kegiatan usaha utama, BPR Kuningan juga menerima transaksi untuk menambah fee base income yaitu dari penerimaan pembayaran listrik, pulsa dan telepon. Akan tetapi transaksi tersebut masih belum maksimal dilaksanakan, sehingga pendapatan yang diterima masih relatif kecil.

Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan.

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan kewajiban atau jumlah pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan kewajiban. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila dipersyaratkan oleh SAK ETAP atau akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal. Dampak perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif dengan menyajikan ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian. Periode sajian adalah periode yang wajib disajikan dalam penyusunan laporan keuangan yang umumnya meliputi 2 (dua) periode laporan keuangan terakhir secara komparatif. Dalam hal perlakuan secara retrospektif tidak praktis (setelah melakukan semua usaha yang wajar/rasional) maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan pada tanggal kebijakan tersebut dimungkinkan dapat diberlakukan.

Kebijakan akuntansi BPR Kuningan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) yang merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK-ETAP, setelah sebelumnya berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (revisi 2000) tentang

Akuntansi Perbankan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI).

Laporan Keuangan disusun berpedoman pada SAK-ETAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan PA BPR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran No. 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010. Laporan Keuangan disusun berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar dan disusun dengan dasar akrual.

Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan periode lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

Atas dasar tersebut, karena kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh BPR Kuningan sudah berpedoman pada SAK-ETAP dan PA BPR, maka tidak ada estimasi akuntansi dan koreksi kesalahan. Hal ini sesuai dengan opini dari Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati adalah “wajar dalam semua hal yang material” dan laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

c. Komitmen dan Kontijensi

Tidak ada kontrak atau perjanjian yang menimbulkan komitmen penggunaan dana pada masa yang akan datang, sehingga tidak ada komitmen yang perlu diungkap di tahun buku 2024,

Pengungkapan untuk kontijensi hanya terjadi sehubungan dengan adanya saldo aset produktif yang dihapus buku sebesar Rp. 25.486.651 ribu dan pendapatan bunga dalam penyelesaian sebesar Rp. 3.488.157 ribu. Baik aset produktif yang dihapus buku maupun pendapatan bunga dalam penyelesaian tidak akan berakibat sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan pengeluaran dana pada masa yang akan datang, karena untuk penagihannya dilakukan secara persuasif.

d. Informasi lain

Di tahun 2024 tidak terdapat informasi lain.

e. Peristiwa setelah tanggal neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca (subsequent event) sehingga tidak mempengaruhi akun-akun laporan keuangan.

BAB V

SURAT KOMENTAR ATAS AUDIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Surat komentar (management letter) atas audit Laporan Keuangan Tahunan yang dilaksanakan oleh KAP Dra. Yati Ruhiyati, telah disampaikan kepada BPR pada tanggal 10 Februari 2025. Surat Komentar dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen dan pihak lain dalam perusahaan, dan tidak disajikan untuk pihak di luar perusahaan guna menghindari kesalahpahaman penyajian dan salah pengertian atas keterbatasan evaluasi suatu struktur pengendalian intern. Secara lengkap Surat Komentar dari KAP Dra. Yati Ruhiyati terlampir.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan ini dibuat, sebagai laporan kegiatan usaha PERUMDA BPR Kuningan selama tahun 2024 yang telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati. Semoga laporan tahunan ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi publik sebagai pemantauan kegiatan usaha BPR.

Akhirnya atas segala kekurangan yang kami sajikan mohon maaf dan menjadi bahan perbaikan kami untuk tahun-tahun kedepan. Pos yang belum tercapai di tahun 2024 semoga dapat direalisasikan di tahun berikutnya dan tahun depan harus lebih baik dari tahun sebelumnya, amin.

Kuningan, 30 April 2025
PERUMDA BPR KUNINGAN

DODO WARDA	**DENI HERYANA**
Direktur Utama	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Bank Kuningan
Perumda BPR Kuningan

Kantor Pusat
Jln. Jendral Sudirman No. 88 Kuningan Jawa Barat
Tlp/Fax 0232 8880208 e-mail : bpr_kng@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN
PERUMDA BPR KUNINGAN TAHUN 2024

Sehubungan dengan Laporan Tahunan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, kami menyatakan bahwa :

1. Direksi telah Menyusun dan menyajikan Laporan Tahunan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas :
   a. Informasi Umum yang meliputi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, startegi dan kebijakan managemen dan laporan managemen.
   b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi tentang komitmen dan kontijensi.
   c. Opini akuntan publik dan laporan akuntan publik atas laporan keuangan yang diaudit, bagi laporan keuangan tahunan BPR yang diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
2. Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan SE OJK nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang pelaporan dan TKK BPR.
3. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Tahunan PERUMDA BPR KUNINGAN telah dimuat secara benar. Laporan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Direksi PERUMDA BPR KUNINGAN bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan PERUMDA BPR KUNINGAN.

Demikian disampaikan dan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PERUMDA BPR KUNINGAN

PERUMDA BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN KANTOR PUSAT

DODO WARDA, S.E., M.M
Direktur Utama

Lampiran-lampiran

Laporan Tahunan
Tahun 2024

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 900.1.13.2/KPTS. 256 Perek & SDA/2025

TENTANG

PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA/RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN PER 31 DESEMBER 2024

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan per 31 Desember 2024, telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati dan dinilai telah memenuhi kaidah yang ditentukan dalam sistem akuntansi, sehingga perlu mendapat pengesahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kepastian hukum pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan;

7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

Memperhatikan:

1. Surat Dewan Pengawas PERUMDA BPR Kuningan Nomor: 01/DP/PERUMDA-BPR-KNG/II/2024 tanggal 7 Pebruari 2025;
2. Laporan Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati Nomor : 00002/2.0029/AU.2/07/0423-4/1/II/2025 dan ML Nomor : 002/ML/KAP-YR/II/2025;
3. Rapat Umum Kuasa Pemilik Modal PERUMDA BPR Kuningan tanggal 14 Pebruari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan Per 31 Desember 2024.

KEDUA : Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 14 Pebruari 2025

Pj. BUPATI KUNINGAN,

AGUS TOYIB

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 900.1.13.2/KPTS. 256 Perek & SDA/2025
TENTANG : PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN PER 31 DESEMBER 2024

NERACA
PERUMDA BPR KUNINGAN
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

NO	POS - POS NERACA	GABUNGAN
	ASET	
1	Kas dalam Rupiah	9.261.585.200
2	Kas dalam Valuta Asing	-
3	Surat Berharga	-
4	Penempatan pada Bank Lain	23.936.958.897
	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(160.458.214)
5	Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	218.875.457.158
	-/- Provisi yang belum diamortisasi	(4.419.106.528)
	Biaya Transaksi yang belum diamortisasi	276.719.585
	-/- Pend. Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka	(321.391.368)
	-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	-
	-/- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	(5.020.517.847)
6	Agunan yang diambil alih	-
7	Aset Tetap dan Inventaris	12.682.108.089
	-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	(7.640.127.087)
8	Aset Tidak Berwujud	323.815.238
	-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	(238.480.022)
9	Aset Antarkantor	-
10	Aset Lainnya	2.670.223.652
	TOTAL ASET	250.226.786.755
	LIABILITAS	
1	Liabilitas Segera	721.508.115
2	Simpanan	
	a. Tabungan	111.676.482.390
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	-
	b. Deposito	66.255.750.000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(163.159.426)
3	Simpanan dari Bank Lain	15.700.000.000
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	-
4	Pinjaman yang Diterima	22.166.666.660
	-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	(273.292.045)
	-/- Diskonto Belum Diamortisasi	-
5	Dana Setoran Modal-Kewajiban	-
6	Liabilitas Antarkantor	-
7	Liabilitas Lainnya	1.213.845.828
	TOTAL LIABILITAS	217.207.891.523

NO	POS - POS NERACA	GABUNGAN
	EKUITAS	-
1	Modal Disetor	
	a. Modal Dasar	50.000.000.000
	b. Modal yang Belum Disetor -/-	(29.117.553.697)
	Tambahan Modal Disetor	-
	a. Agio/Disagio	-
	b. Modal Sumbangan	116.601.094
	c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	-
	d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	-
2	Ekuitas Lain	-
	a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	-
	b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	-
	c. Lainnya	-
	d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	-
3	Cadangan	-
	a. Umum	5.052.660.080
	b. Tujuan	4.207.976.387
4	Laba (Rugi)	-
	a. Tahun-Tahun Lalu	-
	b. Tahun Berjalan (F.0200)	2.669.301.369
	TOTAL EKUITAS	32.928.985.233
	TOTAL EKUITAS & LIABILITAS	250.226.786.755

Pj. BUPATI KUNINGAN,

AGUS TOYIB

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 900.1.13.2/KPTS. 256 Perek & SDA/2025
TENTANG : PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN PER 31 DESEMBER 2024

LABA / RUGI
PERUMDA BPR KUNINGAN
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

POS - POS	JUMLAH
A. Pendapatan Operasional	45.035.763.054
1 Pendapatan Bunga	
a Bunga Kontraktual	
i. Surat Berharga	-
ii. Penempatan pada Bank Lain	
Giro	50.234.967
Tabungan	726.798.409
Deposito	635.946.398
Sertifikat Deposito	-
iii. Kredit yang Diberikan	-
Kepada Bank Lain	-
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	36.400.947.927
b Provisi Kredit	-
i. Kepada Bank Lain	-
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	2.708.117.359
c Biaya Transaksi -/-	-
i. Surat Berharga	-
ii. Kredit yang Diberikan	-
Kepada Bank Lain	-
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	(146.342.865)
d Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	(285.171.979)
2 Pendapatan Lainnya	
a Pendapatan Jasa Transaksi	5.308.041
b Keuntungan Penjualan Valuta Asing	-
c Keuntungan Penjualan Surat Berharga	-
d Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	319.664.017
e Pemulihan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	4.532.176.443
f Lainnya	88.084.336

POS - POS	JUMLAH
B. Beban Operasional	40.512.410.222
1 Beban Bunga	
a Beban Bunga Kontraktual	
i. Tabungan	2.785.199.404
ii. Deposito	3.180.973.189
iii. Simpanan dari bank lain	1.304.171.890
iv. Pinjaman yang diterima	
1) Dari Bank Indonesia	-
2) Dari Bank Lain	1.619.172.452
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	80.950.716
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	-
v. Lainnya	473.110.857
b Biaya Transaksi	
i. Kepada Bank Lain	100.574.992
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	440.705.981
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	12.591.803
3 Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif	-
a. Surat Berharga	-
b. Penempatan pada Bank Lain	759.085.510
c. Kredit yang Diberikan	-
i. Kepada Bank Lain	-
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5.482.658.552
4 Beban Pemasaran	958.705.139
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	-
6 Beban Administrasi dan Umum	-
a Beban Tenaga Kerja	-
i. Gaji dan Upah	11.481.360.345
ii. Honorarium	389.652.128
iii. Lainnya	2.966.721.694
b Beban Pendidikan dan Pelatihan	892.113.428
c Beban Sewa	-
i. Gedung Kantor	23.529.206
ii. Lainnya	396.260.327
d Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	1.118.472.222
e Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	22.634.511
f Beban Premi Asuransi	1.114.528.841
g Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	385.543.995
h Beban Barang dan Jasa	3.717.248.560
i Pajak-pajak	71.075.270
7 Beban Lainnya	-
a Kerugian Penjualan Valuta Asing	-
b Kerugian Penjualan Surat Berharga	-
c Lainnya	735.369.210
C. Laba Operasional	4.523.352.832
Rugi Operasional	-

POS - POS	JUMLAH
D. Pendapatan Non Operasional	1.327.921.092
1 Keuntungan Penjualan	
a Aset Tetap dan Inventaris	-
b AYDA	-
2 Pemulihan Penurunan Nilai	
a Aset Tetap dan Inventaris	-
b AYDA	-
3 Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	623.894.028
4 Bunga Antar Kantor	-
5 Selilsih Kurs	-
6 Lainnya	704.027.064
E. Beban Non Operasional	2.086.005.428
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan	
a Aset Tetap dan Inventaris	-
b AYDA	-
2 Kerugian Penurunan Nilai	-
a Aset Tetap dan Inventaris	-
b AYDA	-
3 Bunga Antar Kantor	-
4 Selisih Kurs	-
5 Lainnya	2.086.005.428
F. Laba Non Operasional	(758.084.336)
Rugi Non Operasional	-
G. Laba Tahun Berjalan	3.765.268.497
Rugi Tahun Berjalan	-
H. Taksiran Pajak Penghasilan	1.095.967.128
I. Jumlah Laba	2.669.301.369
Jumlah Rugi	-

Pj. BUPATI KUNINGAN,

AGUS TOYIB

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 900.1.13.2/KPTS. 256 Perek & SDA/2025

TENTANG : PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN PER 31 DESEMBER 2024

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
PERUMDA BPR KUNINGAN
TAHUN BUKU 2024

NO	PENJELASAN	NOMINAL
1	Laba kotor tahun 2024	3.765.268.497
2	Pajak Penghasilan	1.095.967.128
3	Laba Bersih	2.669.301.369
4	Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebesar 55 % dari Laba Bersih	1.468.115.753
5	Cadangan Umum sebesar 10 % dari Laba Bersih	266.930.137
6	Cadangan Bertujuan sebesar 10 % dari Laba Bersih	266.930.137
7	Dana Kesejahteraan sebesar 10 % dari Laba Bersih	266.930.137
8	Jasa Produksi Sebesar 8 % dari Laba Bersih	213.544.109
9	Tantiem sebesar 4 % dari Laba Bersih	106.772.055
10	Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 3 % dari Laba Bersih	80.079.042

Pj. BUPATI KUNINGAN,

AGUS TOYIB

Bank Kuningan

Kantor Pusat

Jln. Jendral Sudirman No. 88 Kuningan
Jawa Barat
Tlp/Fax 0232 8880208
e-mail : bpr_kng@yahoo.co.id

PERATURAN DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN

Nomor 3 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN

DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Direksi Perumda BPR Kuningan Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku khususnya terkait Pasal 88 POJK No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum penetapan Perubahan Peraturan Direksi Perumda BPR Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat ;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan ;
10. Peraturan Direksi Perumda BPR Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan.

Memperhatikan : Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Otoritas Jasa Keuangan Posisi 30 Agustus 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direksi Perumda BPR Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 13 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Cabang Perumda BPR Kuningan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini :

1. Susunan Organisasi Kantor Pusat Perumda BPR Kuningan.
2. Susunan Organisasi Kantor Cabang Perumda BPR Kuningan.

Pasal II

1. Peraturan Direksi Perumda BPR Kuningan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Agar seluruh Pengurus dan Pegawai Perumda BPR Kuningan mengetahuinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 17 Oktober 2022

PERUMDA BPR KUNINGAN
DIREKSI

DODO WARDA
Direktur Utama

DENI HERYANA
Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

LEMBAR PERSETUJUAN
DEWAN PENGAWAS PERUMDA BPR KUNINGAN

PERATURAN DIREKSI
PERUMDA BPR KUNINGAN

Nomor : 3 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN

Kuningan, 17 Oktober 2022

Menyetujui :
DEWAN PENGAWAS PERUMDA BPR KUNINGAN

Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM

LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TANGGAL 17 OKTOBER 2022
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKSI PERUMDA BPR KUNINGAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN

1. SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PUSAT PERUMDA BPR KUNINGAN

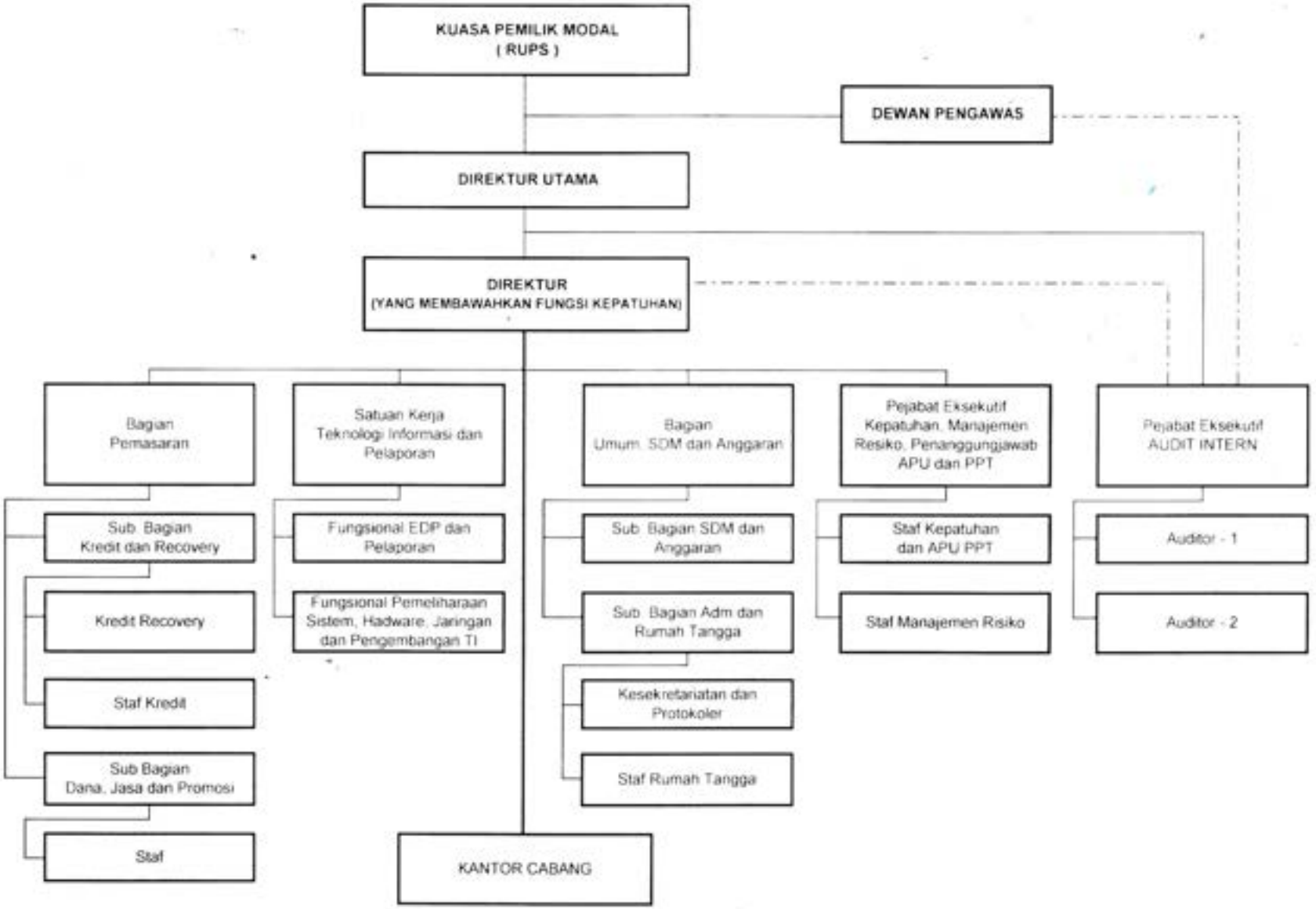

2. SUSUNAN ORGANISASI KANTOR CABANG PERUMDA BPR KUNINGAN

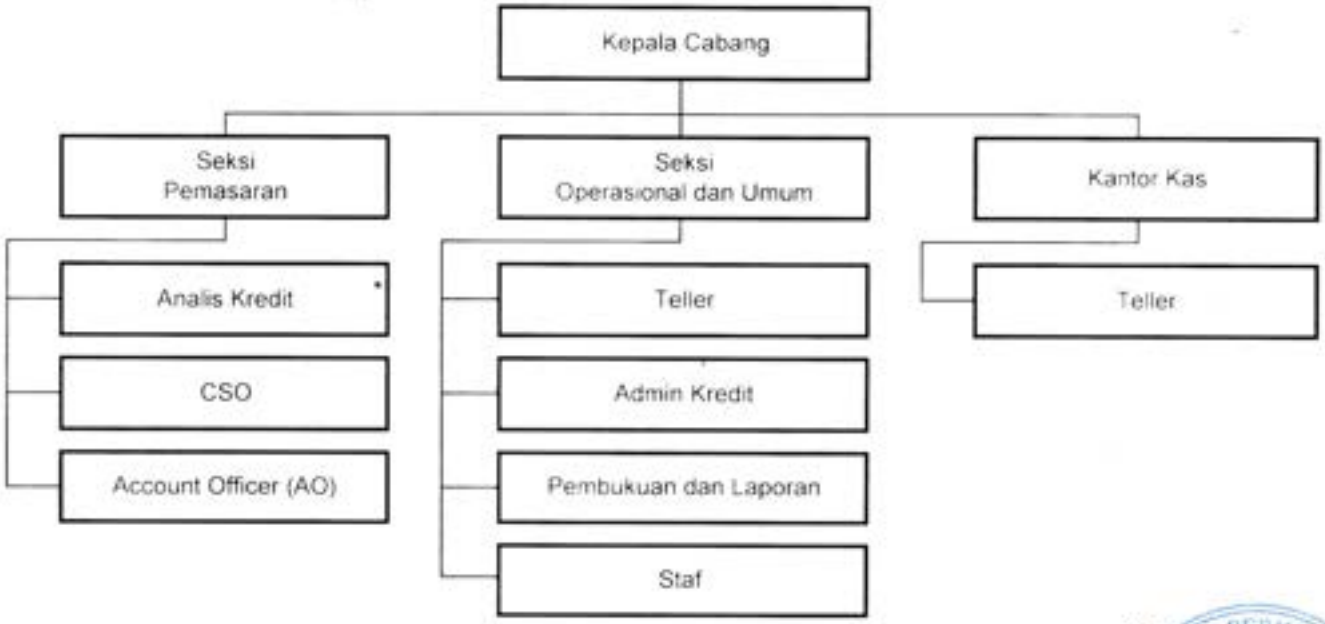

PERUMDA BPR KUNINGAN
DIREKSI,

DODO WARDA
Direktur Utama

DENI HERYANA
Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA BPR KUNINGAN

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

PERUMDA BPR KUNINGAN

Untuk Tahun Berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Bank Kuningan
Perumda BPR Kuningan

Kantor Pusat
Jln. Jendral Sudirman No. 88
Kuningan
Tlp/Fax 0232 880207

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
PERUMDA BPR KUNINGAN

Sehubungan dengan audit saudara atas Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, kami menyatakan bahwa :

1. PERUMDA BPR KUNINGAN adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
2. Direksi telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
4. Semua Informasi dalam laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN telah dimuat secara benar. Laporan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. PERUMDA BPR KUNINGAN telah memuat catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, dan dokumen tersebut disimpan oleh perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Direksi PERUMDA BPR KUNINGAN bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN.

Demikian disampaikan dan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dodo Warda, SE., M.M
Direktur Utama

Kuningan, 07 Februari 2025

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Dra. Yati Ruhiyati
Nomor izin usaha :KEP-605/KM.17/1998

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 00002/2.0029/AU.2/07/0423-4/1/II/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PERUMDA BPR KUNINGAN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Kuningan, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal – hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Jl. Ujung Berung Indah Permai V Blok 24-10, Komplek Ujung Berung Indah, Bandung 40611
Telp. (022) 7803744, Email: yati_ruhiyati@yahoo.com

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengedalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Dra. Yati Ruhiyati
Nomor izin usaha :KEP-605/KM.17/1998

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Dra. Yati Ruhiyati

Dra. Yati Ruhiyati., CA., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik :AP.0423

Bandung, 07 Februari 2025

00002

Jl. Ujung Berung Indah Permai V Blok 24-10, Komplek Ujung Berung Indah, Bandung 40611
Telp. (022) 7803744, Email: yati_ruhiyati@yahoo.com

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi	
Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan 2023	
Neraca Per 31 Desember 2024 Dan 2023	1-2
Laporan Laba Rugi Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan 2023	3
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan 2023	4
Laporan Arus Kas Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan 2023	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 Dan 2023	6 - 29
	Lampiran
Analisis Rasio Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN	I
Perhitungan ATMR	II
Permodalan	III

PERUMDA BPR KUNINGAN
NERACA
31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas	3c, 5	9.261.585.200	7.391.353.000
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	3o, 6	1.015.178.485	832.999.934
Penempatan Pada Bank Lain	3d, 7	23.936.958.897	34.016.574.852
Penyisihan Kerugian Penempatan pada Bank Lain	3f, 8	(160.458.214)	(82.747.396)
Kredit Yang Diberikan	3e,g, 9	214.411.678.847	203.677.115.003
Penyisihan Kerugian Kredit Yang Diberikan	3f, 10	(5.020.517.847)	(3.976.729.335)
Aset Lain - Lain	3j, 13	1.655.045.167	1.823.703.360
JUMLAH ASET LANCAR		**245.099.470.536**	**243.682.269.417**
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap - Bersih	3h, 11	5.041.981.003	5.820.578.068
Aset Tidak Berwujud - Bersih	3i, 12	85.335.216	107.969.727
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**5.127.316.219**	**5.928.547.796**
JUMLAH ASET		**250.226.786.755**	**249.610.817.213**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BPR KUNINGAN
NERACA
31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Segera	3n, 14	721.508.115	832.330.607
Utang Bunga	3n, 15	379.303.205	350.747.844
Utang Pajak	3n, 16 , 32	699.641.068	902.986.226
Simpanan	3o, 17	177.769.072.964	161.897.094.654
Simpanan Dari Bank Lain	3n, 18	15.700.000.000	30.000.000.000
Kewajiban Lain-lain	3n, 21	40.557.114	40.557.114
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**195.310.082.466**	**194.023.716.446**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Pinjaman Diterima	3n, 19	21.893.374.615	23.122.218.573
Kewajiban Imbalan Kerja - Jangka Panjang	3s, 20	94.344.440	152.941.550
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		**21.987.719.055**	**23.275.160.123**
JUMLAH KEWAJIBAN		**217.297.801.521**	**217.298.876.569**
EKUITAS			
Modal Disetor	1d, 22	20.882.446.303	20.882.446.303
Modal Sumbangan	1d, 22	116.601.094	116.601.094
Saldo Laba	3p, 23	11.929.937.837	11.312.893.247
JUMLAH EKUITAS		**32.928.985.234**	**32.311.940.644**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**250.226.786.755**	**249.610.817.213**

Kuningan, 07 Februari 2025

Dodo Warda, SE., M.M
Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BPR KUNINGAN
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga			
Pendapatan Bunga	3q, 24	37.528.755.723	37.048.981.857
Provisi	3r, 25	2.561.774.494	3.356.527.174
Jumlah Pendapatan Bunga		**40.090.530.217**	**40.405.509.031**
Beban Bunga			
Beban Bunga Kontraktual	3q, 26	(9.984.859.482)	(11.007.997.698)
Jumlah Beban Bunga		**(9.984.859.482)**	**(11.007.997.698)**
Pendapatan Bunga (Neto)		**30.105.670.736**	**29.397.511.333**
Pendapatan Operasi Lainnya	3q, 27	4.945.232.837	7.216.892.696
Jumlah Pendapatan Operasional		**35.050.903.573**	**36.614.404.030**
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	3g, 28	(12.591.803)	-
Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	3f, 29	(6.241.744.062)	(9.850.976.442)
Beban Pemasaran	29	(958.705.139)	(1.419.067.960)
Beban Administrasi dan Umum	30	(23.314.509.739)	(22.520.772.444)
Jumlah Beban Operasional		**(30.527.550.743)**	**(33.790.816.845)**
LABA RUGI OPERASIONAL		**4.523.352.830**	**2.823.587.185**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Non Operasional	31	1.327.921.092	1.830.490.749
Beban Non Operasional	31	(2.086.005.425)	(1.131.882.622)
JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL		**(758.084.333)**	**698.608.127**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		**3.765.268.497**	**3.522.195.311**
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	3v, 32	(1.095.967.127)	(956.874.336)
LABA (RUGI) NETO		**2.669.301.370**	**2.565.320.976**

Kuningan, 07 Februari 2025

Dodo Warda, SE., M.M
Direktur Utama

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BPR KUNINGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Modal Disetor	Modal Sumbangan	Saldo Laba			JUMLAH EKUITAS
			Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan	
Saldo per 1 Januari 2023	19.382.446.303	116.601.094	4.507.857.070	3.663.173.377	2.882.709.124	30.552.786.968
Dividen	-	-	-	-	(1.585.490.018)	(1.585.490.018)
Pembentukan Cadangan	-	-	288.270.912	288.270.912	(576.541.825)	-
Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(288.270.912)	(288.270.912)
Jasa Produksi	-	-	-	-	(230.616.730)	(230.616.730)
Tantiem	-	-	-	-	(115.308.365)	(115.308.365)
CSR	-	-	-	-	(86.481.274)	(86.481.274)
Dana Setoran Modal Ekuitas	1.500.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.565.320.976	2.565.320.976
SALDO PER 31 DESEMBER 2023	**20.882.446.303**	**116.601.094**	**4.796.127.982**	**3.951.444.289**	**2.565.320.976**	**32.311.940.644**
Dividen	-	-	-	-	(1.410.926.537)	(1.410.926.537)
Pembentukan Cadangan	-	-	256.532.098	256.532.098	(513.064.195)	-
Dana Kesejahteraan	-	-	-	-	(256.532.098)	(256.532.098)
Jasa Produksi	-	-	-	-	(205.225.678)	(205.225.678)
Tantiem	-	-	-	-	(102.612.839)	(102.612.839)
CSR	-	-	-	-	(76.959.629)	(76.959.629)
Dana Setoran Modal Ekuitas		-	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	2.669.301.370	2.669.301.370
SALDO PER 31 DESEMBER 2024	**20.882.446.303**	**116.601.094**	**5.052.660.080**	**4.207.976.387**	**2.669.301.370**	**32.928.985.234**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BPR KUNINGAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN 2023
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Neto	2.669.301.370	2.565.320.976
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	1.140.216.711	513.125.155
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	22.634.511	19.547.694
Penyisihan Kerugian (Pembalikan atas penyisihan) untuk :		
Penyisihan Kerugian penempatan pada Bank Lain	77.710.818	82.747.396
Penyisihan Kerugian Kredit Yang Diberikan	1.043.788.512	(144.435.177)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(182.178.551)	347.936.203
Penempatan Pada Bank Lain	10.079.615.954	27.817.888.420
Kredit Yang Diberikan	(10.734.563.844)	(11.535.546.171)
Aset Lain-lain	168.658.193	655.721.416
Kewajiban Segera	(110.822.492)	(44.157.759)
Utang Bunga	28.555.360	(5.061.235)
Utang Pajak	(203.345.157)	457.926.917
Simpanan	15.871.978.309	21.494.349.437
Simpanan Dari Bank Lain	(14.300.000.000)	(27.700.000.000)
Kewajiban Imbalan Kerja - Jangka Pendek	-	-
Kewajiban Lain-lain	(0)	0
Kewajiban Imbalan Kerja - Jangka Panjang	(58.597.110)	32.941.550
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.512.952.583**	**14.558.304.822**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(361.619.646)	357.983.800
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	-	(38.850.000)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(361.619.646)**	**319.133.800**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman Diterima	(1.228.843.958)	(12.684.616.722)
Modal Disetor	-	1.500.000.000
Modal Sumbangan	-	-
Cadangan Umum	256.532.098	288.270.912
Cadangan Tujuan	256.532.098	288.270.912
Saldo Laba	(2.565.320.976)	(2.882.709.124)
ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**(3.281.100.737)**	**(13.490.784.022)**
KENAIKAN (PENURUNAN) PENURUNAN ARUS KAS	**1.870.232.200**	**1.386.654.600**
KAS AWAL PERIODE	7.391.353.000	6.004.698.400
KAS AKHIR PERIODE	**9.261.585.200**	**7.391.353.000**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PERUMDA BPR KUNINGAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Pembanding Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan Landasan Hukum

PERUMDA BPR KUNINGAN yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 88 Kuningan Jawa Barat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Izin Operasional PD. BPR Kuningan berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 7/6/KEP.D.P.G/2005 Tanggal 21 Oktober 2005, yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 88 Kuningan.

Kelembagaan penggabungan usaha (merger) PD. BPR Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 19 Tahun 2004 Tentang Perusahaan Daerah BPR Kuningan Merger.

Perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kuningan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kuningan Hasil Marger diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kuningan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Perkreditan Rakyat Kuningan.

Pengalihan Izin Usaha Dari PD BPR Kuningan Kepada PERUMDA BPR Kuningan Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-121/KO/02011/2019 Tanggal 6 September 2019 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 88 Kuningan.

b. Fungsi

Fungsi PERUMDA BPR Kuningan adalah mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan diharapkan menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di Wilayah Kabupaten Kuningan.

c. Kegiatan Usaha

Sebagai perusahaan daerah, PERUMDA BPR Kuningan melakukan kegiatan usahanya berpedoman kepada dua orientasi, yaitu :

a) Orientasi terhadap laba *(profit oriented)*, yaitu mendapatkan laba operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b) Orientasi terhadap kepedulian sosial *(social oriented)*, yaitu mempunyai kepekaan terhadap kebutuhan akan modal kerja masyarakat pelaku bisnis dalam mendukung pertumbuhuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Kuningan.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, PERUMDA BPR Kuningan mempunyai bidang usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka, memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan, beroperasi dengan sistem imbalan jasa berupa bunga terhadap debitur maupun kreditur.

d. Permodalan

Komposisi kepemilikan modal pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

	Modal Dasar	Prosentase	Belum Disetor	Modal Disetor
- Pemerintah Kab. Kuningan	50.000.000.000	100%	29.117.553.697	20.882.446.303
	50.000.000.000	**100%**	**29.117.553.697**	**20.882.446.303**

e. Struktur Organisasi

Organisasi dan tata kerja yang dibentuk sesuai dengan tugas dan wewenang serta tanggung-jawab pada 31 Desember 2024 adalah dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Pengawas :

SK. Bupati No. 584.3/KPTS. 759-PEREK&SDA/2022 & No. 584.3/KPTS.807-PEREK&SDA/2022 Pengangkatan Dewan Pengawas Perumda BPR Kuningan Periode 2022 - 2026, yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 & 21 November 2022 yaitu :

- Dewan Pengawas (Ketua) : Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM.
- Dewan Pengawas (Anggota) : Drs. H. Uca Somantri, M.Si.

Direksi :

SK. Bupati No. 900.1.13.2/KPTS.739 - PEREK&SDA/2024 & No. 900.1.13.2/KPTS.740 - PEREK&SDA/2024 Pengangkatan Kembali Direksi Perumda BPR Kuningan Periode 2024-2027 yang ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2024 :

- Direktur Utama : Dodo Warda, SE.
- Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhar : Deni Heryana, S.Sos.

Pejabat Eksekutif :

- PE Kepatuhan, Manajemen Resiko dan APU PPT	: Adih Setiadi
- PE Audit Intern	: Henda Hendrayana, SE
- Kepala Bagian Umum, SDM dan Anggaran	: Ulan, S.E.
- Kepala Bagian Pemasaran	: Juju Juherman, SE
- Kepala Satuan Kerja TI dan Pelaporan	: Ii Maret Giwa, SE
- Pemimpin Cabang Utama	: Arief Komara, SE
- Pemimpin Cabang Kadugede	: Rika Farliani, S.E., M.Si.
- Pemimpin Cabang Cidahu	: Andriyanto Surya Kusuma, SE
- Pemimpin Cabang Ciawigebang	: Ucu Kristianto, SE
- Pemimpin Cabang Lebakwangi	: Lukman Salim, S.AB.
- Pemimpin Cabang Mandirancan	: Muhamad, SE
- Pemimpin Cabang Garawangi	: Ria Putriyani,SE

Jumlah karyawan PERUMDA BPR Kuningan sebanyak 103 Orang.

2. PENYERTAAN KEPATUHAN, TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan Keuangan Tahun 2024 merupakan tanggung jawab Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk diterbitkan tanggal 07 Februari 2025.

Laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan telah mematuhi dalam semua hal material Standar Akuntansi Keuangan tersebut.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyampaian laporan kuangan adalah Rupiah. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam satuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

Ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang ditetapkan PERUMDA BPR Kuningan periode 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (*going concern*) serta mengikuti konversi harga historis (*historical cost*). Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten.

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar akrual (*accrual basis*), kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai *non-performing* dan dicatat secara dasar kas (*cash basis*).

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan Pedoman Akuntansi BPR.

Laporan arus kas menyajikan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, dimana dalam metode tersebut laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas.

Disamping itu dihitung pula penangguhan/akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan serta unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional. Semua jumlah-jumlah transaksi dan saldo akun disajikan dalam rupiah, kecuali dijelaskan lain.

Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat terjadinya transaksi.

Pada Tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

c. Kas

Kas meliputi seluruh uang kertas dan logam rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang berada di Kas.

d. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain dinyatakan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Saldo Penempatan pada Bank Lain disajikan terpisah dengan Penyisihan Kerugian atas Penempatan pada Bank Lain. Penyisihan tersebut ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing saldo penempatan pada akhir periode tertentu.

e. Kredit Yang Diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah bruto tagihan Bank yang belum dilunasi oleh nasabah setelah dikurangi penyisihan kerugian kredit dan amortisasi provisi kredit serta ditambahi beban kredit. Kredit yang diberikan dihapusbukukan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga. Penerimaan dari kredit *performing* diakui melunasi bunga terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kredit *non-performing* yang digolongkan diragukan dan macet, penerimaan ini dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit karena kemungkinan ketertagihannya sangat diragukan.

f. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset ini dipergunakan untuk mencatat penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR, dan Peraturan OJK No. 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dengan rincian sebagai berikut :

<u>PPKA Umum</u>

Aset Produktif memiliki Kualitas Lancar	:	0,5 %

<u>PPKA Khusus</u>

Aset Produktif memiliki Kualitas Dalam Perhatian Khusus	:	3 %
Aset Produktif memiliki Kualitas Kurang Lancar	:	10 %
Aset Produktif memiliki Kualitas Diragukan	:	50 %
Aset Produktif memiliki Kualitas Macet	:	100 %

Rincian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA khusus ditetapkan paling tinggi :

a) 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;

b) 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;

c) 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;

d) 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;

e) 50% (lima puluh persen) dari NJOP berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau surat Keterangan NJOP terakhir dengan instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;

f) 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;

g) 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek

h) 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;

i) 50% (lima puluh persen) untuk bagian kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat, atau;

j) 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

k) 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

Kualitas Aset Produktif dalam bentuk Penempatan pada Bank Lain ditetapkan:

a) Lancar : dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga;
b) Kurang Lancar : dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 hari kerja.
c) Macet : i. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 hari kerja;
ii. bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus;
iii. Bank yang menerima Penempatan pada Bank Lain telah dilikuidasi.

g. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsensi khusus kepada debitur, yaitu konsensi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan pihak debitur.

Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan masih memenuhi kewajibannya setelah kredit direstrukturisasi. Cara restrukturisasi yaitu :

- Modifikasi persyaratan kredit : penurunan suku bunga, perpanjangan, pengurangan tunggakan.
- Penambahan fasilitas kredit : fresh money atau konversi tunggakan bunga.

h. Aset Tetap dan Penyusutannya

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurang akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahaan aset dan biaya restorasi relokasi. Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkanankan, kecuali dilakukan berdasarkan kententuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Pengelompokan Aset	Masa Manfaat Ekonomis	Penyusutan Tarif/Tahun
Bangunan dan Gedung		20 Tahun	5%
Kendaraan Roda 2	Golongan 1	4 Tahun	25%
Kendaraan Roda 4	Golongan 2	8 Tahun	12,50%
Peralatan Kantor 1	Golongan 1	4 Tahun	25%
Pesalatan Kantor 2	Golongan 2	8 Tahun	12,50%

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Aset tetap yang terjual dikeluarkan dari kelompok aset yang bersangkutan dan laba atau rugi yang diperoleh dari penjualan tersebut dilaporkan dalam Laporan Aktivitas Investasi tahun yang bersangkutan.

Aset Tetap yang dibuat sendiri dan sampai akhir periode akuntansi belum selesai dibukukan ke aset dalam proses.

i. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat didentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

j. Aset Lain - Lain

Aset Lain-lain adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

k. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada sast tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan beradasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

l. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan aset bank yang diperoleh sehubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah (disajikan dalam akun "Agunan Yang Diambil Alih" - AYDA)

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagi keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

m. Biaya Dibayar di Muka

Biaya Dibayar di Muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

n. Kewajiban

Kewajiban merupakan saldo kewajiban/utang masa kini bank yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik Bank yang mengandung manfaat ekonomi.

o. Simpanan

Tabungan dan Deposito dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah. Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

p. Cadangan

Cadangan dipergunakan untuk mencatat perkiraan cadangan umum dan tujuan yang berakaitan dengan penyisihan dari laba yang diperoleh pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah PERUMDA Kuningan No. 2 Tahun 2019.

a. Bagian Laba untuk Daerah	:	55%
b. Cadangan Umum	:	10%
c. Cadangan Tujuan	:	10%
d. Dana Kesejahteraan	:	10%
e. Jasa Produksi	:	8%
f. Tantiem	:	4%
g. CSR	:	3%

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban Bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai nonperforming (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (cash basis).

Pendapatan bunga yang akan diterima dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

r. Pendapatan Provisi dan Komisi

Pendapatan Provisi dan Komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu ditangguhkan dan diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktunya. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi ditangguhkan, diakui pada saat kredit dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi.

s. Kewajiban Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaiman diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada kententuan Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (UU Cipta Kerja). Dalam ketentuan tersebut perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubunga kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (UU Cipta Kerja) adalah program imbalan pasti.

Kewajiban Imbalan Kerja adalah saldo kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Kewajiban Segera sebesar jumlah yang terutang dan tidak didiskontokan. Kewajiban imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos yang didiskontokan.
Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode tertentu.

Kewajiban Imbalan Kerja berkurang pada saat dibayarkan. Kewajiban imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tidak didiskonto (*undiscounted amount*). Kewajiban imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah yang telah didiskonto (*discounted amount*).

t. Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, bank melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (terkait) adalah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.03/2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 11/POJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah bahwa pengertian pihak terkait sebagai berikut:

a. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali BPR;
b. Anggota Direksi;
c. Anggota Dewan Komisaris;
d. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal, dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c;
e. Pejabat Eksekutif;
f. Perusahaan bukan bank yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya baik secara Individu maupun keseluruhan paling rendah 25% dari modal disetor perusahaan;
g. BPR lain yang dimiliki oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e yang kepemilikannya secara individu paling rendah 10% dari modal disetor pada BPR lain tersebut;
h. BPR lain yang anggota Dewan Komisarisnya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris BPR dan rangkap jabatan pada BPR lain dimaksud paling rendah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada BPR;
i. Perusahaan yang paling rendah 50% dari jumlah keseluruhan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris BPR;
j. Peminjam atau Nasabah Penerima Fasilitas yang diberikan jaminan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i.

u. Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal pelaporan, uraian dan sifat kewajiban kontijensi jika praktis dilakukan.

v. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

Beban pajak kini merupakan pajak penghasilan yang pada laporan laba rugi ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan setelah diadakan penyesuaian antara prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

BPR memiliki eksposur terhadap risiko yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 & SEOJK No 1/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Resiko serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 & SEOJK No 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bagi Bank Perkreditan Rakyat di bawah ini :

- Risiko Kredit
- Risiko Operasional
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Reputasi
- Risiko Stratejik

a. Risiko Kredit

Salah satu Risiko usaha yang dihadapi BPR adalah Risiko Kredit atau *Credit Risk*, yaitu risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit; disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit Bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan - kebijakan dan proses - proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, *origination* dan persetujuan kredit, penetapan *pricing*, pemantauan, pengelolan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. *Credit Risk Policy* secara *bankwide* digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini bisnis dan Entitas Anak dalam menjalankan aktivitas perkreditan. *Credit Risk Policy* direview minimal setahun sekali, untuk menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini.

Sistem pengukuran risiko kredit dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :

1. Karakteristik setiap jenis transaksi Risiko Kredit.
2. Jangka waktu kredit (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, khususnya dilingkungan BPR.
3. Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.
4. Potensi terjadinya kegagalan membayar (default) baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional atau historikal.

Manajemen BPR dapat melakukan pengendalian risiko kredit sebagai berikut :

1. Pemisahan Fungsi, Kegiatan pemberian fasilitas kredit hingga pengelolaan risiko dilakukan oleh bagian yang terpisah sesuai fungsinya, misalnya bagian analisa, memutus serta penagihan kredit macet dilakukan oleh fungsi yang berbeda.
2. Pemantauan Kredit, Pemantauan atas portofolio kredit BPR dilakukan dengan membuat sejumlah laporan secara rutin kepada manajemen.
3. Persetujuan kredit, Pemberian kredit harus melalui persetujuan dari pejabat kredit sesuai dengan tingkat otoritas yang dimilikinya.
4. Pengendalian Fisik Agunan, Agunan kredit dikelola oleh unit yang berbeda sesuai fungsinya termasuk proses penyimpanannya yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tersendiri.

b. Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidak cukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prisip kehati-hatian. Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari Bank. Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhdap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tujuan manajemen risiko operasional adalah meningkatkan pengawasan operasional melalui pengumpulan data kerugian/ kejadian risiko operasional yang berkaitan dengan aktivitas operasional, selain itu data kerugian/kejadian digunakan untuk memperbaiki proses operasional pada aktivitas pekerjaan masing-masing, dan kemudian mengukur tingkat risiko yang dihitung berdasarkan data tersebut dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko Operasional
2. Pengukuran Risiko Operasional
3. Pemantauan Risiko Operasional
4. Pengendalian Risiko Operasional
5. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

c. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan BPR tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko BPR yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risko kredit terkait dengan ketentuan. Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) sesuai POJK No.33/POJK.03/2018. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sesuai POJK No. 23/POJK.03/2022 & SEOJK No. 11/SOJK.03/2023 dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Risiko lain termasuk risiko akibat kelemahan hukum. Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipatuhinya syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Pemantauan risiko kepatuhan umumnya dilakukan oleh Unit Kerja Kepatuhan dari Unit Manajemen Risiko, meliputi :

1. Pemantauan atas implementasi Manajemen risiko kepatuhan disetiap unit kerja dan melaporkan hasilnya kepada Direktur yang membidangi.
2. Melakukan analisa terhadap trend peningkatan atau penurunan risiko kepatuhan termasuk tindakan dan upaya yang diperlukan dalam meminimalkan terjadinya kerugian yang lebih besar, terutama yang bersifat material dan/atau yang berdampak pada permodalan BPR.
3. Melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko kepatuhan dan dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informatif sehingga dapat digunakan oleh pihak pengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan.
4. Pemantauan dilakukan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, maupun per aktivitas fungsional oleh unit kerja terkait. Misalnya pemantauan atas kepatuhan terhadap Perjanjian Kredit, kepatuhan terhadap limit, dan lain-lain.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat dipengaruhi tanpa mengganggu aktifitas dan kondisi keuangan Bank, ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan :

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Ketidakmampuan Bank memperoleh pendanaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga semakin meningkat risiko likuiditas dan selanjutnya dapat mempengaruhi aspek - aspek keuangan lainnya yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank. Mengingat permasalahan likuiditas sebagaimana dimaksud diatas dapat memberikan dampak yang signifikan, maka Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk risiko likuiditas secara efektif baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Tujuan utama dari penerapan risiko likuiditas adalah untuk memastikan kecukupan dana secara harian baik pada saat kondisi normal maupun kondisi krisis dalam pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Penerapan risiko untuk risiko likuiditas secara efektif paling kurang mencukupi :

a. Pengawas aktif Dewan Komisaris dan Direksi
b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penempatan limit manajemen resiko
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
d. Sisitem pengendalian intern yang menyeluruh

e. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.

f. Risiko Stratejik

Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

5. KAS

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo kas dengan rincian sebagai berikut:		
- Kas	9.261.585.200	7.391.353.000
Jumlah Kas	**9.261.585.200**	**7.391.353.000**
Kas menurut kantor cabang terdiri dari :		
- Kantor Cabang Utama	5.499.182.400	3.410.427.400
- Kantor Cabang Kadu gede	513.278.300	666.190.700
- Kantor Cabang Cidahu	689.162.000	690.616.500
- Kantor Cabang Ciawigebang	745.015.900	732.439.100
- Kantor Cabang Lebakwangi	617.311.300	689.664.700
- Kantor Cabang Mandirancan	631.004.500	523.303.700
- Kantor Cabang Garawangi	586.630.800	678.710.900
Jumlah Kas Menurut Kantor Cabang	**9.261.585.200**	**7.391.353.000**

6. PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, dengan rincian sbb :		
- Bunga Bank Accrual	7.119.863	6.143.835
- Bunga Kredit Accural	1.008.058.622	826.856.099
Jumlah Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	**1.015.178.485**	**832.999.934**

Pendapatan bunga yang akan diterima diakui berdasarkan dari perhitungan bunga *performing*.

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo penempatan pada bank lain, dengan rincian sbb :		
a. Berdasarkan Jenis Simpanan		
- Giro pada bank lain	1.152.035.367	1.612.981.929
- Tabungan pada bank lain	15.784.923.530	21.903.592.923
- Deposito pada bank lain	7.000.000.000	10.500.000.000
Jumlah Berdasarkan Jenis Simpanan	**23.936.958.897**	**34.016.574.852**
b. Giro Berdasarkan Jenis Bank :		
- Giro Bank Muamalat	125.767.022	126.007.022
- Giro Bank Permata	900.568	-
- Giro Bank BTN	99.960.408	-
- Giro Bank Jabar	289.076.254	1.159.726.792
- Giro Bank Mandiri	78.857.069	18.699.256
- Giro Bank BRI	3.198.076	4.001.694
- Giro Bank BNI	554.275.971	304.547.166
Jumlah Giro Berdasarkan Jenis Bank	**1.152.035.367**	**1.612.981.929**
c. Tabungan Berdasarkan Jenis Bank :		
- Tabungan Bank BRI	623.230.180	3.550.889.624
- Tabungan Bank BJB 2	1.788.190.723	4.965.093.348
- Tabungan Bank Mandiri - 0830	911.743.027	68.207.911
- Tabungan Bank Mandiri - 4162	3.304.338.790	9.623.771.171
- Tabungan Bank Muamalat	7.855.662.910	1.533.082.424
- Tabungan Bank BJB Syariah	144.862.715	143.872.631
- Tabungan Bank BPR Lestari Bali	368.735.880	358.777.208
- Tabungan BPR Intan Jabar	61.414.157	1.056.396.680
- Tabungan Bank Permata	511.923.303	503.389.566
- Tabungan BPR Bank Jombang	101.131.810	100.112.360
- Tabungan BPR Kencana	113.690.035	-
Jumlah Tabungan Berdasarkan Jenis Bank	**15.784.923.530**	**21.903.592.923**
d. Deposito Berdasarkan Jenis Bank :		
- Bank Mualamat	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Intan Jabar (Perseroda)	1.000.000.000	-
- PERUMDA BPR GARUT	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Delta Artha Perseroda	-	2.000.000.000
- PT. BPR Kencana	2.000.000.000	2.000.000.000
- PT. BPR Kerta Raharja	1.000.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Raksa Wacana Agri Pumama	1.000.000.000	1.000.000.000
- Bank Jabar Banten	-	2.500.000.000
Jumlah Deposito Berdasarkan Jenis Bank	**7.000.000.000**	**10.500.000.000**
e. Deposito Berdasarkan Jangka Waktu :		
- Deposito 1 Bulan	2.500.000.000	4.500.000.000
- Deposito 3 Bulan	-	-
- Deposito 6 Bulan	4.500.000.000	3.500.000.000
- Deposito 12 Bulan	-	2.500.000.000
Jumlah Deposito Berdasarkan Jangka Waktu	**7.000.000.000**	**10.500.000.000**

8. PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET - PENEMPATAN PADA BANK LAIN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain, dengan rincian sebagai berikut:		
Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain yang telah dibentuk	**(160.458.214)**	**(82.747.396)**

Untuk penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain yang wajib dibentuk telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

9. KREDIT YANG DIBERIKAN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo kredit yang diberikan sebesar tersebut terdiri dari:		
a. Jenis kredit berdasarkan transaksi :		
Pokok Kredit yang Diberikan		
- Kredit Pertanian	1.131.844.996	1.467.349.353
- Kredit Perdagangan	100.630.602.016	85.226.335.770
- Kredit Jasa	964.366.734	994.616.627
- Kredit Konsumtif	24.103.093.587	24.029.861.129
- Kredit Pegawai	6.559.248.608	7.286.648.460
- Kredit PKL	2.825.000	2.825.000
- Kredit Dana Talangan	1.318.929.325	1.441.000.000
- Kredit Sertifikasi	13.058.562.506	16.074.146.719
- Kredit Kepala Daerah & DPRD	622.668.191	671.475.864
- Kredit Perangkat Desa	70.483.316.194	70.761.054.216
Jumlah Pokok Kredit	**218.875.457.158**	**207.955.513.138**
Provisi Kredit yang Diberikan		
- Provisi Kredit	(4.419.106.528)	(4.177.501.886)
- Administrasi	276.719.585	216.722.457
- Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(321.391.368)	(317.618.706)
Jumlah Provisi Kredit	**(4.463.778.311)**	**(4.278.398.135)**
Total Kredit yang Diberikan	**214.411.678.847**	**203.677.115.003**

b. Kolektibilitas kredit per Kantor Cabang :

	31 Desember 2024					
Jenis Kredit	**Lancar**	**DPK**	**Kurang lancar**	**Diragukan**	**Macet**	**Jumlah**
- Cabang Utama	30.589.289.637	1.396.162.145	266.995.523	1.002.700.096	3.192.367.329	36.449.514.729
- Cabang Kadu gede	30.779.742.341	421.578.575	106.805.565	234.798.214	1.181.818.238	32.724.742.933
- Cabang Cidahu	34.795.615.666	500.648.493	139.163.792	172.437.064	547.509.540	36.155.374.555
- Cabang Ciawigebang	25.331.584.763	202.028.774	42.402.778	90.199.095	217.828.953	25.884.044.363
- Cabang Lebakwangi	28.299.338.047	473.090.899	6.684.165	95.826.664	667.428.684	29.542.368.460
- Cabang Mandirancan	31.246.842.344	805.528.646	83.687.226	223.382.384	351.288.106	32.710.728.707
- Cabang Garawangi	24.131.390.495	479.802.144	10.650.000	83.521.514	703.319.258	25.408.683.411
Jumlah Pokok Kredit	**205.173.803.293**	**4.280.839.677**	**656.389.047**	**1.902.865.032**	**6.861.560.108**	**218.875.457.158**
Provisi Kredit						(4.419.106.528)
Administrasi						276.719.585
Pendapatan Bunga Ditangguhkan						(321.391.368)
Total Kredit						**214.411.678.847**

	31 Desember 2023					
Jenis Kredit	**Lancar**	**DPK**	**Kurang lancar**	**Diragukan**	**Macet**	**Jumlah**
- Cabang Utama	29.923.874.078	2.014.582.015	686.557.913	758.487.823	1.998.057.612	35.381.559.441
- Cabang Kadu gede	28.242.204.408	439.789.536	190.180.018	179.189.090	565.989.183	29.617.352.236
- Cabang Cidahu	33.171.498.741	320.798.103	42.102.168	192.332.190	376.794.350	34.103.525.552
- Cabang Ciawigebang	23.702.819.477	420.700.346	88.900.270	58.284.832	94.649.643	24.365.354.568
- Cabang Lebakwangi	27.242.147.518	235.787.753	294.770.136	284.627.270	443.540.486	28.500.873.163
- Cabang Mandirancan	29.999.044.365	345.869.071	174.402.238	90.446.886	266.078.196	30.875.840.756
- Cabang Garawangi	23.674.087.256	709.691.125	159.511.177	37.837.531	529.880.334	25.111.007.423
Jumlah Pokok Kredit	**196.955.675.843**	**4.487.217.948**	**1.636.423.921**	**213.831.708.563**	**4.274.989.804**	**207.955.513.138**
Provisi Kredit						(4.177.501.886)
Administrasi						216.722.457
Pendapatan Bunga Ditangguhkan						(317.618.706)
Total Kredit						**203.677.115.003**

c. Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

	31-Dec-24	31-Dec-23
- Pertanian	1.131.844.996	1.467.349.353
- Perdagangan	100.630.602.016	85.226.335.770
- Jasa	964.366.734	994.816.627
- Konsumtif	116.148.643.412	120.267.011.388
Jumlah Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi	**218.875.457.158**	**207.955.513.138**

d. Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit

- Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	2.691.874.381	2.597.234.444
- Lebih dari 1 - 5 tahun	67.476.579.871	66.652.002.605
- Lebih dari 5 - 10 tahun	148.707.002.906	138.706.276.089
Jumlah Berdasarkan Jangka Waktu Perjanjian Kredit	**218.875.457.158**	**207.955.513.138**
Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa :		
- Terkait	2.064.215.614	2.259.050.471
- Tidak Terkait	216.811.241.544	205.696.462.667
Jumlah	**218.875.457.158**	**207.955.513.138**

e. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

1) Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan berupa Sertifikat (SHM), AJB, Letter C dan BPKB yang dikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh BPR.
2) Kredit modal kerja dan konsumsi terdiri dari kredit modal pengembangan usaha, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya. Suku bunga kredit berkisar 10% S.d. 36% per tahun
3) Kredit karyawan adalah kredit yang diberikan kepada karyawan untuk membeli kendaraan, rumah, atau keperluan lainnya dengan tingkat bunga sebesar 1% pinjaman dan bunganya dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan.
4) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
5) Kredit hapus buku pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing berjumlah Rp. 25.485.301.724 dan Rp. 25.544.367.083,-
6) Jumlah restrukturisasi kredit sebanyak 124 Debitur dan berjumlah sebesar Rp. 3.423.258.385

10. PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET - KREDIT

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo penyisihan kerugian kredit yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:		
- Penyisihan Kerugian Kredit	(5.020.517.847)	(3.976.729.335)
Jumlah	**(5.020.517.847)**	**(3.976.729.335)**
Pembentukan masing-masing kantor :		
- Kantor Cabang Utama	(2.419.864.973)	(2.173.963.454)
- Kantor Cabang Kadu gede	(933.247.354)	(448.835.178)
- Kantor Cabang Cidahu	(344.203.675)	(292.765.771)
- Kantor Cabang Ciawigebang	(158.318.816)	(169.724.430)
- Kantor Cabang Lebakwangi	(417.868.503)	(386.216.039)
- Kantor Cabang Mandirancan	(419.379.172)	(318.162.135)
- Kantor Cabang Garawangi	(327.635.353)	(187.062.327)
Penyisihan Kerugian kredit yang telah dibentuk	**(5.020.517.847)**	**(3.976.729.335)**

Untuk penyisihan kredit yang wajib dibentuk telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian kredit tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

11. ASET TETAP

Jumlah saldo aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Perolehan :				
Tanah	286.054.000	-	-	286.054.000
Bangunan	4.337.055.246	73.098.146	-	4.410.153.392
Kendaraan	3.955.995.000	69.775.000	-	4.025.770.000
Inventaris Kantor	3.741.384.197	218.746.500	-	3.960.130.697
Jumlah	**12.320.488.443**	**361.619.646**	**-**	**12.682.108.089**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	1.087.390.217	297.054.618	-	1.384.444.834
Kendaraan	2.905.599.809	387.867.298	-	3.293.467.107
Inventaris Kantor	2.506.920.349	455.294.796	-	2.962.215.145
Jumlah	**6.499.910.375**	**1.140.216.711**	**-**	**7.640.127.086**
Nilai buku	**5.820.578.068**			**5.041.981.003**

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Nilai Perolehan :				
Tanah	286.054.000	-	-	286.054.000
Bangunan	4.337.055.246	-	-	4.337.055.246
Kendaraan	4.535.652.000	22.700.000	602.357.000	3.955.995.000
Inventaris Kantor	3.519.710.997	221.673.200	-	3.741.384.197
Jumlah	**12.678.472.243**	**244.373.200**	**602.357.000**	**12.320.488.443**
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	840.757.517	246.632.700	-	1.087.390.217
Kendaraan	3.068.693.467	164.460.213	327.553.871	2.905.599.809
Inventaris Kantor	2.077.334.236	429.586.114	-	2.506.920.349
Jumlah	**5.986.785.219**	**840.679.026**	**327.553.871**	**6.499.910.375**
Nilai buku	**6.691.687.024**			**5.820.578.068**

12. ASET TIDAK BERWUJUD

Jumlah saldo aset tidak berwujud dengan rincian sebagai berikut :

	31 Desember 2024			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan :				
Program Software IT	323.815.238	-	-	323.815.238
Jumlah biaya perolehan	**323.815.238**	**-**	**-**	**323.815.238**
Akumulasi Amortisasi				
Program Software IT	215.845.511	22.634.511	-	238.480.022
Jumlah	**215.845.511**	**22.634.511**	**-**	**238.480.022**
Nilai buku	**107.969.727**			**85.335.216**

	31 Desember 2023			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan :				
Program Software IT	284.965.238	38.850.000	-	323.815.238
Jumlah biaya perolehan	**284.965.238**	**38.850.000**	**-**	**323.815.238**
Akumulasi Amortisasi				
Program Software IT	196.297.817	19.547.694	-	215.845.511
Jumlah	**196.297.817**	**19.547.694**	**-**	**215.845.511**
Nilai buku	**88.667.421**			**107.969.727**

13. ASET LAIN-LAIN

Jumlah saldo aset lain-lain dengan rincian sbb. :

	31-Dec-24	31-Dec-23
a. Uang Muka Pajak		
- Pajak Dibayar Dimuka PPh Pasal 25	-	-
b. Biaya Dibayar Dimuka		
- Premi Asuransi Gedung	-	2.138.815
- Premi Asuransi Kendaraan	27.808.560	23.011.216
- Premi Asuransi CIS	24.166.667	30.052.083
- Pembayaran VA BNI	-	2.497.500
- Premi Asuransi Tabungan Simpel	-	302.708
- Premi Asuransi Lainnya	89.611.580	80.127.173
- Sewa Tanah dan Bangunan	129.454.907	103.021.880
- Premi Asuransi Cash In Box	-	266.667
- Premi Asuransi Lainnya	135.760.837	126.396.170
- Sewa Lahan Parkir	36.900.000	19.000.000
- Iuran Perbarindo	2.000.000	1.000.000
- Biaya Promosi Dibayar Dimuka	39.666.612	31.583.342
- Sewa Dibayar Dimuka	78.108.800	-
- Piutang Asuransi Kredit	533.476.920	486.930.169
c. Aset Lain - Lain		
- Uang Muka Promosi		-
- Persediaan Barang Cetakan	5.189.250	1.730.000
- Persediaan Materai	-	90.000
- ASL Lainnya	314.512.070	546.631.271
- RRA - Biaya Admin dan Umum	7.000.000	321.000
- RRA - ASL Lainnya	231.588.965	368.603.367
Jumlah Aset Lain-Lain	**1.655.045.167**	**1.823.703.360**

14. KEWAJIBAN SEGERA

Jumlah saldo Kewajiban Segera dengan rincian sbb. :

	31-Dec-24	31-Dec-23
- **Kewajiban Kepada Pemerintah :**		
- Ksd - PPh 21 Karyawan	66.717.237	67.977.036
- Ksd - PPh 23 Tabungan	15.557.305	14.107.258
- Ksd - PPh 23 Deposito	53.314.417	52.755.858
- Ksd - PPh 23 Tabungan Pasti	2.650.329	2.650.329
- Titipan Nasabah Yang Belum Jelas	179.711.233	162.648.067
- Titipan Tabungan dan Deposito	28.221.500	14.044.500
- Titipan Angsuran Kredit	42.458.920	42.558.922
- Titipan Kredit Bendahara	1.427.069	1.724.569
- Kewajiban Sera EDC	129.135.766	123.162.424
- Kewajiban Fee Sera EDC	-	3.157.800
- Titipan Notaris	-	13.350.000
- Titipan Asuransi Pinjaman	-	160.288.691
- Titipan Asuransi Pinjaman Cabang	20.264.361	-
- Titipan Notaris Cabang	9.000.000	-
- Titipan Nasabah Lainnya	49.746.802	16.646.271
- Titipan Sera Pending	520.000	56.000
- **Kewajiban Segera Lainnya :**		
- Titipan Jamsostek	22.694.297	13.478.113
- Titipan BPJS	10.761.758	33.981.592
- Titipan CSR Bank Kuningan	76.832.119	89.872.490
- Kewajiban Segara Lainnya	12.495.002	19.870.687
Jumlah Kewajiban Segera	**721.508.115**	**832.330.607**

15. UTANG BUNGA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo Utang Bunga, dengan rincian sbb :		
- Tabungan Berjangka	121.926.421	40.825.843
- Bunga Deposito Jatuh Tempo	46.470.470	52.776.488
- Bunga Deposito YMHD (Accrual)	167.131.915	149.457.519
- Bunga Tabungan YMHD (Accrual)	19.391.543	18.079.776
- Bunga ABP Jatuh Tempo	-	20.136.986
- Bunga ABP (Accrual)	24.382.855	69.471.233
Jumlah Utang Bunga	**379.303.205**	**350.747.844**

16. UTANG PAJAK

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo Utaing Pajak, dengan rincian sbb :		
- Utang Pajak Pasal 29	699.641.068	902.986.226
Jumlah Utang Pajak	**699.641.068**	**902.986.226**

17. SIMPANAN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah tersebut merupakan saldo Simpanan, dengan rincian sbb :		
- Tabungan	111.676.482.390	102.312.194.819
- Deposito	66.092.590.574	59.584.899.836
Jumlah	**177.769.072.964**	**161.897.094.654**

a. Rincian Tabungan Menurut Jenis Tabungan :

- Tabungan Masyarakat	56.645.875.375	56.030.424.865
- Tabungan Siswa	495.684.389	645.083.207
- Tabungan Kotak Mas	1.315.552.039	1.336.359.608
- Tabungan Pemerintah	9.989.080.106	7.568.082.850
- Tabungan Siswa Plus	9.685.330.746	8.874.227.812
- Tabunganku	1.798.219.917	1.322.962.325
- Tabungan Pasti	18.184.810.000	16.730.288.500
- Tabungan Arisanku	547.200.000	-
- Tabungan Idul Fitri	8.070.177.966	4.435.580.017
- Simpanan Pelajar	929.779.699	737.843.322
- Tabungan Ciremaiku	4.014.772.154	4.631.342.312
Jumlah Tabungan	**111.676.482.390**	**102.312.194.819**
Rincian tabungan yang memiliki hubungan istimewa :		
- Terkait	316.096.012	439.584.933
- Tidak Terkait	111.360.386.378	101.872.609.885
Jumlah	**111.676.482.390**	**102.312.194.819**

	31-Dec-24	31-Dec-23
b. Deposit Berjangka		
- Deposito Berjangka 1 Bulan	3.636.450.000	2.721.000.000
- Deposito Berjangka 3 Bulan	9.115.400.000	7.625.150.000
- Deposito Berjangka 6 Bulan	10.910.000.000	13.447.700.000
- Deposito Berjangka 9 Bulan	512.000.000	665.000.000
- Deposito Berjangka 12 Bulan	38.646.900.000	31.048.000.000
- Deposito Suka -Suka 12 Bulan	2.405.000.000	3.255.000.000
- Deposito Suka - Suka 24 Bulan	1.030.000.000	1.030.000.000
Jumlah	**66.255.750.000**	**59.791.850.000**
- Biaya Transaksi Deposito	(163.159.426)	(206.950.164)
Jumlah Deposito	**66.092.590.574**	**59.584.899.836**

Keterangan :
Tingkat suku bunga deposito berjangka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing - masing berkisar antara 1,44% - 6,75% dan 1,44% - 6,75%.

Rincian deposito yang memiliki hubungan istimewa :		
- Terkait	350.000.000	810.000.000
- Tidak Terkait	65.905.750.000	58.981.850.000
Jumlah	**66.255.750.000**	**59.791.850.000**

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo simpanan dari bank lain dengan rincian sbb. :		
- PT. BPR Cahaya Fajar	1.500.000.000	1.500.000.000
- Perumda BPR Garut	2.000.000.000	2.000.000.000
- PD. BPR Bank Kota Cirebon	-	3.000.000.000
- PD. BPR Subang Gemi Nastiti	2.000.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR BKK Jepara	1.000.000.000	3.500.000.000
- PT. BPR Pantura Abadi	500.000.000	500.000.000
- PT. BPR Cianjur Jabar	2.000.000.000	2.000.000.000
- PT. BPR Metro Asia Mandiri	700.000.000	1.000.000.000
- PT. BPR Gamon	-	1.000.000.000
- PT. BPR Gita Makmur Utama	-	1.000.000.000
- PT. BPR Ukabima Lestari	-	500.000.000
- PT. BPR Kertaharja (Perseroda)	2.000.000.000	5.000.000.000
- PT. BPR Indra Candra	-	2.000.000.000
- Perumda BPR Bank Kulon Progo	2.000.000.000	2.000.000.000
- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat	-	2.000.000.000
- PT. BPR Cirebon Jabar	2.000.000.000	2.000.000.000
Jumlah Deposito	**15.700.000.000**	**30.000.000.000**
Simpanan Berdasarkan Jangka Waktu :		
- Deposito ABP 1 Bulan	2.500.000.000	6.500.000.000
- Deposito ABP 3 Bulan	6.000.000.000	5.000.000.000
- Deposito ABP 6 Bulan	7.200.000.000	18.500.000.000
Jumlah Deposito	**15.700.000.000**	**30.000.000.000**

Keterangan :
Tingkat suku bunga deposito berjangka Per 31 Desember 2024 & 2023 masing - masing berkisar antara 5,50% - 6,75% dan 5,50% - 6,75%.

19. PINJAMAN DITERIMA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo pinjaman diterima dengan rincian sbb. :		
Pinjaman Yang Diterima Lainnya :		
- Bank Jabar BJB	22.166.666.660	20.416.666.660
- Pinjaman LPDB	-	2.961.619.000
Jumlah Pinjaman Yang Diterima Lainnya	**22.166.666.660**	**23.378.285.660**
- Biaya Transaksi Pinjaman BJB	(273.292.045)	(246.067.037)
- Biaya Administrasi Pinjaman LPDB	-	(10.000.050)
Jumlah Biaya Administrasi	**(273.292.045)**	**(256.067.087)**
Jumlah Pinjaman Diterima	**21.893.374.615**	**23.122.218.573**

Keterangan Pinjaman Diterima :

1) Pinjaman Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Usaha Kecil Dan Menengah (LPDB-KUKM) berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) No. 137/SP3/LPDB/2019 Tahun 2019, Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Pinjaman/Pembiayaan KUKM, Plapond kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,-, Bentuk Pinjaman : Executing, Jangka waktu : 36 Bulan, Suku bunga : 6% p.a sliding. Pencairan Tahap I sebesar Rp. 15.000.000.000,-.

2) Pinjaman dari PT. Bank Jabar Banten berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) 15/KNG-LKM/2017 tanggal 22 Maret 2018, Jenis Kredit : KMK BPR, Plafond Kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- Sifat Kredit : Non Revolving Basis, Jangka Waktu : 36 Bulan, Masa Penarikan : 12 Bulan, Suku Bunga : 10% p.a Efektif Jaminan : Piutang Lancar PD. BPR Kuningan diikat secara Fidusia sebesar minimal 100% dari outstanding kredit.

3) Pinjaman dari PT. Bank Jabar Banten berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) 0241/KUN-KOM/2020 tanggal 30 Juli 2020, Jenis Kredit : KMK BPR, Plafond Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- Sifat Kredit : Non Revolving Basis, Jangka Waktu : 36 Bulan, Masa Penarikan : 12 Bulan, Suku Bunga : 10% p.a Efektif Jaminan : Cash Collateral di Bank BJB minimal 1 kali angsuran dan Piutang Lancar PD. BPR Kuningan diikat secara Fidusia sebesar minimal 100% dari outstanding kredit.

4) Pinjaman dari PT. Bank Jabar Banten berdasarkan Surat No : 115/KW3-BKU/2022 tanggal 28 November 2022, Jenis Kredit : KMK BPR, Plafond Kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- Sifat Kredit : Non Revolving Basis, Jangka Waktu : 60 Bulan, Masa Penarikan : 12 Bulan, Suku Bunga : minimal 9,50% p.a Efektif Jaminan : Cash Collateral di Bank BJB minimal 1 kali angsuran dan Piutang Lancar PD. BPR Kuningan diikat secara Fidusia sebesar minimal 100% dari outstanding kredit.

5) Pinjaman dari PT. Bank Jabar Banten berdasarkan Surat No : 171/KW3-BKU/2024 tanggal 28 November 2024, Jenis Kredit : KMK BPR, Plafond Kredit sebesar Rp. 10.000.000.000,- Sifat Kredit : Non Revolving Basis, Jangka Waktu : 48 Bulan, Masa Penarikan : 12 Bulan, Suku Bunga : minimal 12,50% p.a Efektif Jaminan : Cash Collateral di Bank BJB minimal 1 kali angsuran dan Piutang Lancar PD. BPR Kuningan diikat secara Fidusia sebesar minimal 100% dari outstanding kredit.

20. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA - JANGKA PANJANG

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo Kewajiban Imbalan Kerja dengan Rincian Sbb :		
- Imbalan Pensiun	94.344.440	152.941.550
Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja - Jangka Panjang	**94.344.440**	**152.941.550**

21. KEWAJIBAN LAIN - LAIN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo Kewajiban Lain - Lain dengan Rincian Sbb :		
- Bagian Laba Propinsi	1.403.874	1.403.874
- Dana Bergulir	7.100.000	7.100.000
- Lainnya	32.053.240	32.053.240
Jumlah Kewajiban Lain - Lain	**40.557.114**	**40.557.114**

22. MODAL

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah saldo kepemilikan Modal dengan rincian sbb :		
- Modal Dasar	50.000.000.000	50.000.000.000
- Modal Belum Disetor	(29.117.553.697)	(29.117.553.697)
Jumlah Modal Yang Telah Disetor	**20.882.446.303**	**20.882.446.303**

Komposisi kepemilikan modal pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

	Modal Dasar	Belum Disetor	Modal Disetor
Pemerintah Kabupaten Kuningan	50.000.000.000	29.117.553.697	20.882.446.303
	50.000.000.000	**29.117.553.697**	**20.882.446.303**

- **Modal Sumbangan**	**116.601.094**	**116.601.094**

23. SALDO LABA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Cadangan		
Jumlah Saldo Cadangan dengan rincian sebagai berikut :		
- Cadangan Umum	5.052.660.080	4.796.127.982
- Cadangan Tujuan	4.207.976.387	3.951.444.289
Jumlah Cadangan	**9.260.636.467**	**8.747.572.271**

Jumlah cadangan merupakan akumulasi dari penyisihan laba usaha yang diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Daerah Pengelolaan PD. BPR Kuningan No. 11 Tahun 2010 pasal 53 dengan ketentuan Cadangan Umum sebesar 15% dan Cadangan Tujuan 10%.

Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Tujuannya :		
- Saldo Laba Rugi Tahun Berjalan	2.669.301.370	2.565.320.976
Jumlah Saldo Laba	**11.929.937.837**	**11.312.893.247**

24. PENDAPATAN BUNGA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah pendapatan bunga tahun berjalan dengan rincian sbb :		
Pendapatan Bunga Bank		
a. Pendapatan Bunga Giro		
- Bank BNI	29.348.520	18.297.266
- Bank BJB	10.691.056	50.268.987
- Bank BTN	13.010	-
- Bank Mandiri	10.181.813	40.722.673
- Bank Permata	568	-
Jumlah Pendapatan Bunga Giro	**50.234.967**	**109.288.926**
b. Pendapatan Bunga Tabungan		
- Bank Jabar	525.744.321	238.914.265
- Bank Mandiri	129.384.383	147.140.598
- Bank Saudara	8.633.737	-
- Bank Permata	-	3.389.566
- Bank Muamalat	16.399.161	2.944.389
- Bank Danamon	-	2.279.587
- Bank Jabar Syariah	1.050.083	1.039.726
- BPR	18.734.570	46.749.951
- Bank BRI	26.852.154	276.101.462
Jumlah Pendapatan Bunga Tabungan	**726.798.409**	**718.559.544**
c. Pedapatan Bunga Deposito		
- Bank Mualamat	114.913.745	-
- Bank Jabar	72.508.682	72.499.998
- BPR	448.523.971	456.742.663
Jumlah Pendapatan Bunga Deposito	**635.946.398**	**529.242.661**
Jumlah Pendapatan Bunga Dari Bank Lain	**1.412.979.774**	**1.357.091.131**
d. Pihak Ketiga Bukan Bank		
- Bunga KYD Pertanian	197.458.246	195.698.716
- Bunga KYD Industri	-	10.902.438
- Bunga KYD Perdagangan	13.691.373.162	10.461.156.054
- Bunga KYD Jasa	151.701.708	185.503.594
- Bunga KYD Konsumtif	4.948.269.805	5.184.627.710
- Bunga KYD Pegawai	874.241.822	913.030.880
- Bunga Dana Talangan	-	40.565
- Bunga Sertifikasi	3.602.210.973	4.278.160.775
- Bunga Pinjaman Kepala Daerah & DPRD	179.136.334	343.266.492
- Bunga SILTAP	12.756.555.876	14.679.827.685
- Beban Koreksi Pendapatan Bunga	(285.171.979)	(560.324.183)
Jumlah Pedapatan Bunga Pihak Ketika Bukan Bank	**36.115.775.949**	**35.691.890.726**
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	**37.528.755.723**	**37.048.981.857**

25. PENDAPATAN PROVISI DAN ADMINISTRASI

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah pendapatan Provisi dan Administrasi yang diperoleh dengan rincian sbb:		
Pendapatan Provisi :		
- Provisi Kredit Yang Diberikan	2.664.615.221	3.224.986.452
- Pendapatan Adm Kredit Yang Diberikan	43.502.138	288.136.236
Jumlah Pendapatan Provisi	**2.708.117.359**	**3.513.122.688**
Biaya Transaksi :		
- Biaya Administrasi Kredit	(146.342.865)	(156.595.513)
Jumlah Biaya Transaksi	**(146.342.865)**	**(156.595.513)**
Jumlah Pendapatan Provisi dan Administrasi	**2.561.774.494**	**3.356.527.174**

26. BEBAN BUNGA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Beban Bunga yang dibayarkan, dengan rincian sbb :		
Tabungan Pihak Ketiga		
- Tabungan Masyarakat	732.446.852	689.074.578
- Tabungan Siswa	5.801.992	5.131.379
- Tabungan Kotak Mas	11.178.568	8.096.606
- Tabungan Pemerintah	790.748.641	461.102.194
- Tabungan Siswa Plus	71.741.826	62.499.317
- Tabunganku	7.116.759	8.033.628
- Tabungan Pasti	900.557.300	649.914.000
- Tabungan Idul Fitri	159.954.328	91.456.753
- Simpanan Pelajar	3.277.970	1.080.377
- Tabungan Ciremaiku	85.960.692	14.599.889
- Tabungan Arisan	16.414.477	-
Jumlah	**2.785.199.404**	**1.990.988.722**
Deposito Pihak Ketiga		
- Berjangka 1 Bulan	114.476.424	76.565.480
- Berjangka 3 Bulan	316.303.971	326.143.596
- Berjangka 6 Bulan	630.929.548	571.646.328
- Berjangka 9 Bulan	31.404.440	16.139.315
- Berjangka 12 Bulan	1.978.588.948	1.576.400.336
- Suka - Suka 12 Bulan	92.361.121	85.114.206
- Suka - Suka 24 Bulan	16.908.737	13.701.063
Jumlah	**3.180.973.189**	**2.665.710.323**
Beban Bunga Deposito Bank Lain	1.304.171.890	2.786.114.134
Beban Bunga Pinjaman Yang Diterima Bank Lain	1.619.172.452	2.513.489.514
Beban Bunga Pinjaman Yang Diterima Pihak Ketiga Bukan Bank	80.950.716	245.956.969
Beban Premi Fee Pinjaman LPS	473.110.857	472.396.441
Beban Transaksi Pihak Ketiga Bukan Bank :		
- Beban Transaksi Bank Lain	100.574.992	113.774.843
- Cashback Deposito	345.291.995	174.756.389
- Hadiah / Pengerahan DP3	25.598.063	19.112.396
- Transaksi Tabungan	59.815.873	15.697.991
- Beban Transaksi Admin LPDB	10.000.050	9.999.976
Jumlah	**4.018.686.889**	**6.351.298.653**
Jumlah Beban Bunga	**9.984.859.482**	**11.007.997.698**

27. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya, dengan rincian sbb. :		
- Pendapatan Fee Lainnya	5.308.041	-
- Pendapatan Atas Pokok Kredit Hapus Buku	283.982.548	337.406.323
- Pendapatan Atas Bunga Kredit Hapus Buku	35.681.369	33.475.874
- Pemulihan PPKA ABA	681.374.692	308.450.119
- Pemulihan PPKA Kredit YD	3.850.801.751	6.439.872.940
- Administrasi Bulanan	10.132.632	2.568.000
- Penutupan Rekening	1.683.773	5.223.167
- Administrasi Penalti Deposito	29.575.976	22.990.178
- Pendapatan Denda Kredit	1.699.987	6.596.927
- Pendapatan Adm Tabungan Idul Fitri	40.470.000	22.440.000
- Pendapatan Operasional Lainnya	4.521.969	37.869.169
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**4.945.232.837**	**7.216.892.696**

28. BEBAN KERUGIAN RESTRUKTURISASI KREDIT

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian, dengan rincian sbb. :		
- Beban Kerugian Restrukturisasi KYD	12.591.803	-
Jumlah Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	**12.591.803**	**-**

29. BEBAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian, dengan rincian sbb. :		
Bunga Penyisihan Kerugian		
- Penempatan pada Bank Lain	759.085.510	391.197.515
- Kredit Yang Diberikan : Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	5.482.658.552	9.459.778.926
Jumlah Beban Penyisihan Penilaian Kualitas Aset	**6.241.744.062**	**9.850.976.442**

30. BEBAN PEMASARAN

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah beban Pemasaran, dengan rincian sbb :		
- Promosi Dan Edukasi	958.705.139	1.419.067.960
Jumlah Beban Pemasaran	**958.705.139**	**1.419.067.960**

30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah Beban Administrasi Dan Umum, dengan rincian sbb :		
Beban Tenaga Kerja		
a. Beban Gaji, Honor dan Tunjangan :		
- Beban Gaji Pokok	3.529.934.595	3.560.916.360
- Beban Tunjangan Istri	301.240.217	308.563.640
- Beban Tunjangan Anak	282.822.221	283.325.389
- Beban Tunjangan Pangan	1.557.921.521	1.572.958.177
- Beban Tunjangan Jabatan	1.793.468.000	1.773.078.000
- Beban Tunjangan Perumahan	30.000.000	30.000.000
- Beban Tunjangan Kehadiran	803.545.500	966.424.000
- Beban Tunjangan PPh Pasal 21	510.414.723	531.762.233
- Beban Tunjangan BBM	856.896.000	1.024.810.000
- Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan	452.990.000	455.577.500
- Beban THR Pengurus dan Pegawai	1.350.127.568	917.549.319
- Beban Honor Pegawai Kontrak	12.000.000	12.000.000
- Beban Tunjangan Penghasilan Lainnya		-
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan	**11.481.360.345**	**11.436.964.618**
b. Honorarium		
- Beban Honorarium Dewan Pengawas	365.956.704	369.861.120
- Beban Tunjangan PPh 21 Honorarium	23.695.424	24.725.904
Jumlah Beban Honorarium	**389.652.128**	**394.587.024**
c. Beban Tenaga Kerja Lainnya		
- Beban Tunjangan Pensiun	868.477.920	1.344.354.975
- Beban Pakaian Seragam	216.000.000	144.000.000
- Beban Lembur Pegawai	52.501.725	17.412.479
- Beban G13	898.097.039	455.257.112
- Honorarium Pegawai Kontrak	264.135.972	187.500.000
- Biaya TPP Peg. Kontrak	29.099.000	22.700.000
- Biaya Tunj. Kehadiran Peg. Kontrak	40.970.000	40.185.000
- Biaya Bonus Pengurus & Pegawai	9.640.000	-
- Beban Tenaga Kerja Lainnya	587.800.038	208.744.000
Jumlah Beban Tenaga Kerja Lainnya	**2.966.721.694**	**2.420.153.566**
Jumlah Beban Tenaga Kerja	**14.837.734.167**	**14.251.705.208**
c. Beban Pendidikan	**892.113.428**	**662.512.468**

d. Beban Sewa :		
- Sewa Gedung Kantor	23.529.206	17.950.000
- Sewa Peralatan	-	100.000
- Sewa SIGMA	-	525.474.000
- Sewa Lahan Parkir	12.000.000	12.583.343
- Sewa Kendaraan	362.462.000	4.350.000
- Sewa Lainnya	21.798.327	12.041.320
Jumlah Beban Sewa	**419.789.533**	**572.498.663**
e. Beban Penyusutan		
- Penyusutan Bangunan / Gedung	287.510.363	243.528.514
- Penyusutan Kendaraan	387.867.297	439.263.342
- Penyusutan Inventaris Kantor	443.094.564	432.690.299
Jumlah Beban Penyusutan	**1.118.472.224**	**1.115.482.156**
f. Beban Amortisasi		
- Penyusutan Software	22.634.511	19.547.694
Jumlah Beban Amortisasi	**22.634.511**	**19.547.694**
g. Beban Premi Asuransi		
- Premi Asuransi Kebakaran	2.138.815	2.397.573
- Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	71.375.379	64.586.508
- Premi Asuransi Cash In Save	42.135.415	32.604.164
- Premi Asuransi Cash In Transit	33.862.500	48.665.000
- Premi Asuransi BPJS	266.461.617	276.118.699
- Asuransi Cash In Box	266.667	-
- Premi Asuransi Kecelakaan	252.394.676	186.994.508
- Premi Asuransi Jamsostek	326.568.939	340.490.226
- Premi Asuransi Tafakul	278.542	-
- Premi Asuransi Tabungan Simpel	-	1.313.958
- Premi Asuransi Lainnya	119.046.292	67.971.352
Jumlah Beban Premi Asuransi	**1.114.528.841**	**1.021.141.989**
h. Beban Pemeliharaan & Perbaikan :		
- Pemeliharaan Gedung Kantor	124.370.015	64.676.500
- Pemeliharaan Kendaraan	141.795.088	147.752.241
- Pemeliharaan Inventaris	49.397.900	28.486.550
- Pemeliharaan Lainnya	69.980.992	44.366.815
Jumlah Beban Pemeliharaan & Perbaikan	**385.543.995**	**285.282.106**
i. Beban Barang dan Jasa		
- Beban Alat Tulis	255.083.813	259.775.476
- Beban Barang Cetakan	245.370.700	234.997.000
- Beban Foto Copy dan Penjilidan	16.991.350	25.385.750
- Beban Bahan Bacaan	32.337.000	37.123.000
- Beban Benda Pos & Kirim Surat	51.104.210	56.105.800
- Beban Alat Listrik	18.365.797	24.530.054
- Beban Telp / Fax / Telex / Fax	67.919.108	53.069.585
- Beban Listrik & Air	185.668.190	177.274.825
- Beban Jamuan / Rapat	380.000	1.382.000
- Beban Perleng. Kebersihan & Rt	69.099.343	69.902.642
- Beban Perjalan Dinas	230.260.777	183.272.328
- Beban Pembelian BBM	20.838.098	18.236.320
- Beban Jasa Perbaikan	150.000	600.000
- Beban Keamanan	1.425.000	4.250.000
- Beban Collection & Pencairan	6.978.433	16.294.997
- Beban IPTW	225.000	101.250
- Administrasi Bank Lain	38.064.243	76.346.952
- Beban Retribusi	14.337.924	1.762.000
- Beban Jasa EDC	202.600	2.626.800
- Beban Penyelesaian Kredit	194.705.198	234.988.544

- Beban Akuntan	53.500.000	48.500.000
- Biaya Makan & Minum Pegawai	119.714.769	135.917.927
- Beban Pembelian Air Mineral	59.476.259	67.184.507
- Beban Jasa Satpam dan OB	1.066.353.270	999.741.321
- Beban Alat Komputer	11.859.844	18.689.800
- Beban Jamuan Tamu	37.221.124	33.467.826
- Beban TV Kabel	2.040.000	1.510.000
- Beban Komunikasi Pegawai	139.968.630	137.740.462
- Beban Barang dan Jasa Lainnya	208.327.973	189.833.040
- Beban Web Site	6.620.907	3.420.800
- Beban CBS SIGMA	562.659.000	-
Jumlah Beban Barang Dan Jasa	**3.717.248.560**	**3.114.031.006**
j. Beban Pajak Bukan Penghasilan :		
- PBB	1.765.220	1.762.720
- Pajak Kendaraan Bermotor	60.304.800	58.609.000
- Pajak Iuran / Retribusi	220.000	970.000
- Pajak - Pajak Lainnya	8.785.250	5.940.000
Jumlah Pajak Bukan Penghasilan	**71.075.270**	**67.281.720**
k. Beban Operasional Lainnya		
- Beban OJK	104.814.608	130.508.859
- Beban Keagamaan	1.275.000	2.115.000
- Beban Jamuan Tamu / Rapat	89.339.666	78.773.604
- Beban Tanda Mata / Kenang - Kenangan	5.791.660	17.783.425
- Beban Iuran Sekretariat	-	225.000
- Beban Operasional Lainnya	534.148.276	1.181.883.546
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**735.369.210**	**1.411.289.434**
Total Beban Umum & Administrasi	**23.314.509.739**	**22.520.772.444**

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

	31-Dec-24	31-Dec-23
Jumlah pendapatan (beban) non operasional lainnya, dengan rincian sbb :		
Pendapatan Non Operasional		
- Pendapatan Keuntungan Penjualan Aset	-	331.301.740
- Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	623.894.028	667.343.397
- Pendapatan Selisih Lebih Kas	187.418	110.508
- Pendapatan Fee Asuransi	689.669.966	831.735.104
- Pendapatan Non Operasional Lainnya	14.169.680	-
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**1.327.921.092**	**1.830.490.749**

	31-Dec-24	31-Dec-23
Beban Non Operasional		
- Beban Iuran Dharmawanita	42.000.000	8.400.000
- Beban Perbaminda	9.000.000	4.200.000
- Beban Iuran Perbarindo	11.000.000	11.000.000
- Beban Iuran Dana Olahraga	83.000.000	84.000.000
- Beban Sumbangan	568.623.740	499.837.423
- Beban Denda Non Operasional	16.108.101	8.817.366
- Pembayaran TV Kabel	840.000	1.010.000
- Beban Sumbangan Merawat & Melayat	47.829.859	40.012.585
- Beban Sumbangan Pegawai	31.220.187	32.950.000
- Beban Rapat	287.386.950	-
- Beban Non Operasional Lainnya	988.996.588	441.655.248
Jumlah Beban Non Operasional	**2.086.005.425**	**1.131.882.622**
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	**(758.084.333)**	**698.608.127**

32. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antar laba komersil sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

	31-Dec-24	31-Dec-23
Laba Sebelum Pajak	**3.765.268.497**	**3.522.195.311**
- Taksiran Pajak Pasal 25 (Badan)	(1.095.967.127)	(956.874.336)
Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan	**2.669.301.370**	**2.565.320.976**
Laba Sebelum Pajak	**3.765.268.497**	**3.522.195.311**
Koreksi Fiskal :		
- Pendapatan Bunga Tabungan	(726.798.409)	(718.559.544)
- Pendapatan Bunga Giro	(50.234.967)	(109.288.926)
- Promosi dan Edukasi (50%)	479.352.569	709.533.980
- Beban Pensiun	94.344.440	152.941.550
- Beban Sumbangan	647.673.786	572.800.008
- Beban Non Operasional Lainnya	988.996.588	441.655.248
- Beban Denda Pajak	13.018.101	-
- Beban Iuran Dharmawanita	42.000.000	-
Jumlah	**1.488.352.109**	**1.049.082.316**
Laba (Rugi) Fiskal	**5.253.620.605**	**4.571.277.628**
Penghasilan Kena Pajak	**5.253.620.605**	**4.571.277.628**
Peredaran Bruto	**46.363.684.146**	**49.452.892.476**

	Tahun 2024	Tahun 2023		
Pajak Penghasilan	**PKP**	**PKP**		
Tarif Fasilitas	543.903.690	443.697.659	59.829.406	48.806.742
Tarif Tanpa Fasilitas	4.709.716.915	4.127.579.969	1.036.137.721	908.067.593
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan			**1.095.967.127**	**956.874.336**
- Pajak dibayar dimuka - PPh Pasal 25 yang telah disetor			(396.326.059)	(53.888.110)
- Kekurangan/(Kelebihan) PPh Pasal 29			**699.641.068**	**902.986.226**

33. SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam meyusun laporan keuangan, Perusahaan menggunakan basis estimasi dan pertimbangan untuk menentukan saldo - saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik perusahaan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini. Hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula. Berikut ini penjelasan sifat beberapa akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perusahaan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perusahaan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

Lihat catatan 3.f dan 9 yang mengungkapkan besarnya penyisihan kredit dan penurunan nilai kredit.

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perusahaan mereviu umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

Lihat catatan 3.h dan 11 Aset Tetap yang mengungkapkan besarnya beban dan akumulasi penyusutan.

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui imbalan pascakerja karyawan berdasarkan ketentuan dalamUndang - Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (UU Cipta Kerja). Pada saat karyawan berhenti kerja, Perusahaan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar formula yang ditentukan oleh UU tersebut. Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja, dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinnya hubungan kerja. Perseroan mengakui imbalan pascakerja tersebut sebagai beban pada saat karyawan masih aktif berdasarkan metode *projected unit* dan mengakui keuntungan – kerugian actuarial sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Dalam menentukan beban dan kewajiban imbalan pascakerja per tanggal laporan keuangan, Perusahaan menggunakan asumsi keuangan dan asumsi aktuarial.

Lihat catatan 3.s dan 20 Perusahaan sudah membentuk dan mengungkapkan kewajiban imbalan pascakerja Tahun 2024 dan 2023.

34. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan POJK No. 23/POJK.03/2022 & SEOJK No. 11/SOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, yaitu tidak melebihi BMPK sebesar 10% dari modal Bank.

35. PENGUNGKAPAN LAINNYA

	31-Dec-24	31-Dec-23
a. TAGIHAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI		
Jumlah saldo tagihan komitmen dan kontijensi, dengan rincian sbb :		
Aset Komitmen		
- Fasilitas Pinjaman Yang Diterima Belum Ditarik	-	-
- Fasilitas Kredit Kepada Nasabah Belum Ditarik	-	-
- Lain - Lain	-	-
Jumlah Aset Komitmen	-	-
Aset Kontinjensi		
- Bunga Dalam Penyelesaian	3.488.157.960	1.994.248.000
- Aset Produktif Yang Dihapus Bukukan	25.486.651.732	25.774.295.000
Jumlah Aset Kontijensi	**28.974.809.692**	**27.768.543.000**

b. PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Untuk melaksanakan program penjaminan pemerintah atas kewajiban bank dibentuklah Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3), yaitu sebuah institusi baru menggantikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Dasar hukum pembentukan UP3 tersebut antara lain adalah:

a. Keputusan Presiden No. 15/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

b. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum,

Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tentang Pembentukan Kedudukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Umum.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program penjaminan tersebut, pemerintah membentuk lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud yaitu dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) pemerintah menetapkan besarnya premi penjaminan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan 2 (dua) kali setahun.

b. PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, BPR telah membayar premi program penjaminan simpanan masing - masing sebesar Rp. 473.110.857 dan Rp. 472.396.442.

c. PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Dasar hukum penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Program APU dan PPT Merupakan program dalam rangka penyempurnaan penerapan prisip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi BPR sesuai dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama yang berbasis teknologi informasi.

Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati - hatian BPR/BPRS dan paling kurang mencakup: a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kebijakan dan prosedur; c. pengendalian intern; d. sumber daya manusia; e. Sistem Informasi Manajemen.

Bank wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan program APU dan PPT paling lama 12 bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Direksi bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengen membentuk unit kerja khusus dan menunjuk pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan tersebut.

PERUMDA BPR Kuningan telah menyampaikan pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT dan menerapkannya dengan membentuk unit kerja yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi.

d. INFORMASI RATIO KEUANGAN BPR

	31-Dec-24	31-Dec-23
1) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)		
- CAR	16,91%	17,03%
2) Kualitas Aset Produktif		
- Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP)	3,57%	2,62%
- *Non Performing Loan (NPL) Gross*	4,30%	3,61%
- *Non Performing Loan (NPL) Net*	2,52%	2,22%
3) Likuiditas Ratio		
- *Loan to Deposit Ratio (LDR)*	91,62%	88,49%
- *Cash Ratio*	13,45%	17,00%
4) Rentabilitas Ratio		
- *Rasio BOPO*	89,96%	94,07%
- *Rasio Return to Asset (ROA)*	1,29%	1,24%

e. KOMITMEN DAN PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan laporan keuangan ini diterbitkan, tidak terdapat komitmen dan perjanjian penting yang dapat mempengaruhi laporan keuangan.

TINGKAT KESEHATAN BANK

PERUMDA BPR KUNINGAN

PER 31 DESEMBER 2024

LAMPIRAN I

Kriteria Tingkat Kesehatan			Per 31 Desember 2024	
I. PERMODALAN				
KPMM	=	Jumlah Modal	32.781.342.101	**16,91%**
		A T M R	193.866.059.892	
MIAPB	=	Modal Inti	31.594.334.549	**420,59%**
		Aset Produktif Bermasalah (Neto)	7.511.997.257	
II. KUALITAS ASET PRODUKTIF				
KAP	=	Aset Produktif Yang Diklasifikasikan	8.616.903.406	**3,57%**
		Jumlah Aset Produktif	241.660.380.688	
Rasio PPAP	=	PPAP Yang Dibentuk	5.020.616.860	**100,00%**
		PPAP Yang Wajib Dibentuk	5.020.616.860	
NPL Gross	=	Kredit Non Lancar	9.420.814.188	**4,30%**
		Total Kredit	218.875.457.158	
NPL Nett	=	Kredit Non Lancar - PPAP	5.511.997.257	**2,52%**
		Total Kredit	218.875.457.158	
III. EARNING / RENTABILITAS				
ROA	=	Laba Sebelum Pajak	3.765.268.497	**1,29%**
		Rata - Rata Total Aset	292.343.629.279	
BOPO	=	Beban Operasional	40.512.410.224	**89,96%**
		Pendapatan Operasional	45.035.763.054	
NIM	=	Pendapatan Bunga Bersih	30.105.670.736	**10,95%**
		Rata - Rata Aset Produktif	274.862.227.861	
IV. LIKUIDITAS / LIQUIDITY				
Cash Rasio	=	Alat Liquid	26.198.544.097	**13,45%**
		Utang Lancar	194.733.043.710	
LDR	=	Kredit yang diberikan	218.875.457.158	**91,62%**
		Dana yang diterima	238.893.233.599	

PERUMDA BPR KUNINGAN
PERHITUNGAN ATMR
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Lampiran II

KETERANGAN	2024				2024
	Nominal	PPAP	Jumlah	%	ATMR
AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RESIKO (ATMR)					
ASET NERACA					
1.1. Kas	9.261.585.200	-	9.261.585.200	0%	-
1.2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	-	-	-	0%	-
1.3. Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat RI, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet	709.829.327	-	709.829.327	0%	-
1.4. Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	-	-	0%	-
1.5. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau dibawah penguasaan BPR	-	-	-	15%	-
1.6. Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lainnya kepada bank lain.	23.936.958.897	160.458.214	23.776.500.683	20%	4.755.300.137
1.7. Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah					
a. Kredit kepada bank lain	-	-	-	20%	-
b. Kredit kepada Pemerintah Daerah	-	-	-	20%	-
c. Bagian Kredit yang dijamin oleh bank lain	-	-	-	20%	-
d. Bagian Kredit yang dijamin oleh Pemerintah Daerah	-	-	-	20%	-
1.8. Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	-	-	-	20%	-
1.9. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani hak tanggungan atau fidusia	1.214.530.389	3.735.569	1.210.794.820	30%	363.238.446
1.10. Kredit kepada BUMN/BUMD atau kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%					
a. Kredit kepada BUMN/BUMD	-	-	-	50%	-
b. Bagian Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%	-	-	-	50%	-
1.11. Kredit kepada Pegawai/Pensiunan yang memenuhi persyaratan	-	-	-	50%	-
1.12. Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dikuasai oleh BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	9.052.993.044	8.163.646	9.044.829.398	50%	4.522.414.699

PERUMDA BPR KUNINGAN
PERHITUNGAN ATMR
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Lampiran II

KETERANGAN	2024				2024
	Nominal	PPAP	Jumlah	%	ATMR
1.13. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan	91.695.518.896	67.621.058	91.627.897.837	70%	64.139.528.486
1.14. Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	70%	-
1.15. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	108.634.853.569	437.017.591	108.197.835.978	100%	108.197.835.978
1.16. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet					
a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	7.567.731.933	3.477.529.658	4.090.202.275	100%	4.090.202.275
b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	-	-	-	100%	-
1.17. Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud	5.127.316.219	-	5.127.316.219	100%	5.127.316.219
1.18. Agunan yang diambil alih (AYDA) yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	-	-	-	100%	-
1.19. Aset lainnya selain tersebut di atas	2.670.223.652	-	2.670.223.652	100%	2.670.223.652
JUMLAH ATMR	**259.871.541.126**	**4.154.525.737**	**255.717.015.389**		**193.866.059.892**

PERUMDA BPR KUNINGAN
PERMODALAN
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

LAMPIRAN III

KETERANGAN	Per 31 Desember 2024	
	Jumlah Setiap Komponen	Jumlah
I. MODAL INTI		
I.1 Modal Inti Utama		
1.1.1 Modal Disetor	20.882.446.303	20.882.446.303
1.1.2 Cadangan Tambahan Modal		
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	-
1.1.2.2 Dana Setoran Modal Ekuitas	-	-
1.1.2.3 Modal Sumbangan	116.601.094	116.601.094
1.1.2.4 Cadangan Umum	5.052.660.080	5.052.660.080
1.1.2.5 Cadangan Tujuan	4.207.976.387	4.207.976.387
1.1.2.6 Laba (Rugi) Tahun Lalu	-	-
1.1.2.7 Laba (Rugi) Tahun Berjalan		
1.1.2.7.1 Kekurangan Pembentukan PPAP	-	-
1.1.2.7.2 Taksiran hutang PPh dalam hal laba	-	-
1.1.2.8 Laba (Rugi) tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP (maksimum 50% setelah setelah dikurangi taksiran hutang PPh)	1.334.650.685	1.334.650.685
1.1.2.9 Pajak Tangguhan	-	-
1.1.2.10 Goodwill	-	-
1.1.2.11 AYDA berupa tanah, bangunan, dan/atau rumah		
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	-
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 3 tahun s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	-
1.1.2.11.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	-
1.1.2.12 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya		
1.1.2.12.1 Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	-
1.1.2.12.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR	-	
Sub Total cadangan Tambahan Modal	**10.711.888.246**	**10.711.888.246**
Sub Total Modal Inti Utama	**31.594.334.549**	**31.594.334.549**
I.2 Modal Inti Tambahan	-	-
I.3 JUMLAH MODAL INTI (I.1+I.2)	**31.594.334.549**	**31.594.334.549**
II. MODAL PELENGKAP		
II.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (paling tinggi 50% dari modal inti)		
II.2 Keuntungan revaluasi tetap		
II.3 PPAP Umum Yang Wajib Dibentuk (paling tinggi sebesar 1,25% dari Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum)	1.187.007.551	1.187.007.551
II.4 Jumlah Modal Pelengkap (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti (II.1 + II.2 + II.3))	1.187.007.551	1.187.007.551
JUMLAH MODAL	**32.781.342.101**	**32.781.342.101**
RASIO KPMM = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}}$ X 100%		**16,91%**
(Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum)		
RASIO MIAPB = $\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Aset Produktif Bermasalah (Neto)}}$ X 100%		**420,59%**
(Rasio Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah Neto)		

MANAGEMENT LETTER

PERUMDA BPR KUNINGAN

PER 31 DESEMBER 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Dra. Yati Ruhiyati
Nomor Izin Usaha : KEP-605/KM.17/1998

Tanggal : 07 Februari 2025
No : 002/ML/KAP-YR/II/2025
Hal : *Management Letter*

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris
PERUMDA BPR KUNINGAN
Jl. Jendral Sudirman No. 88, Kuningan, Jawa Barat.

Dengan hormat,

Kami telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan PERUMDA BPR KUNINGAN untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 07 Februari 2025 No: 00002/2.0029/AU.2/07/0423-4/1/II/2025

Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut, kami telah melakukan studi dan evaluasi terhadap struktur pengendalian intern perusahaan, seperti yang diharuskan oleh Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat dan luasnya ruang lingkup pemeriksaan serta jenis audit prosedur yang harus dilakukan.

Evaluasi terhadap struktur pengendalian intern perusahaan ini, bukanlah merupakan suatu pemeriksaan khusus terhadap stuktur pengendalian intern perusahaan, dan laporan yang kami buat ini merupakan suatu laporan tambahan dari laporan pemeriksaan kami.

Berikut ini kami sampaikan hasil analisis pemeriksaan, beserta saran maupun rekomendasi terkait hal – hal yang terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. **Penilaian Atas Penggolongan Kualitas Aset Produktif dan Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang dibentuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR)**

   Berdasarkan hasil evaluasi terkait Penilaian Atas Penggolongan Kualitas Aset Produktif dan Kecukupan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang dibentuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bahwa :

   Kondisi :
   BPR telah membentuk penyisihan penghapusan Aset Produktif sebesar 100% yang dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Auditor Independen. Dimana berdasarkan penilaian tingkat kesehatan BPR bahwa, BPR dikatakan sehat minimum membentuk penyisihan penghapusan aset produktif sebesar 81% dan sesuai dengan kaidah SAK ETAP Bab 22 Tentang Penurunan Nilai Aset bahwa Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Kriteria :

1. POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.
2. SAK ETAP Bab 22 Tentang Penurunan Nilai Aset.

2. Rincian Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Berdasarkan hasil evaluasi terkait Rincian Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bahwa :

Kondisi :

Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kriteria :

1. POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah & SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekenomian Rakyat Syariah.
2. SAK ETAP Bab 28 Tentang Pengungkapan Pihak - pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Saran :

Manajemen sebaiknya terus mengevaluasi dan memantau secara berkala terkait jumlah dan kualitas penyediaan Dana kepada pihak terkait maupun tidak terkait agar senantiasa terhindar dari pelanggaran maupun pelampauan BMPK yang diakibatkan karena penurunan modal BPR.

3. Jumlah Dan Kualitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait bahwa :

Kondisi :

BPR telah menyediakan dana kepada pihak terkait tidak melebihi dari batas yang ditentukan yaitu 10% paling tinggi dari modal BPR. Dalam hal ini, modal BPR sebesar Rp. 32.781.342.101 dan 10% nya merupakan batas maksimum pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait sebesar Rp. 3.278.134.210. Dari nilai tersebut, tidak terdapat kondisi dimana BPR menyediakan dana kepada pihak terkait melebihi acuan batas 10% dari modal BPR.

Kriteria :

1. POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah & SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekenomian Rakyat Syariah.
2. SAK ETAP Bab 28 Tentang Pengungkapan Pihak - pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Berdasarkan hasil evaluasi terkait Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR bahwa :

Kondisi :

BPR sebagaimana kondisinya saat ini per 31 Desember 2024 posisi modal BPR sebesar Rp. 32.781.342.101. Rasio KPMM BPR per 31 Desember 2024 yaitu 16.91%. BPR termasuk kategori peringkat 1 yaitu memenuhi kriteria KPMM ≥ 15%. Rasio MIAPB BPR per 31 Desember 2024 yaitu 420,59%. BPR termasuk kategori peringkat 1 yaitu memenuhi kriteria MIAPB ≥ 200%.

Kriteria :

1. POJK Nomor 5/POJK.03/2015 & SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
2. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
3. POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.
4. SEOJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.

Saran :

Modal BPR saat ini sudah cukup baik, namun guna untuk lebih memperkuat permodalan, BPR diharapkan dapat melakukan penambahan modal disetor untuk mengoptimalkan kinerja keuangan BPR.

5. Kewajaran Atas Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Maupun Transaksi Yang Dilakukan Dengan Perlakuan Khusus.

Berdasarkan hasil evaluasi terkait kewajaran atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus bahwa :

Kondisi :
Tidak terdapat kecenderungan ketidakwajaran atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.

Kriteria :
1. POJK Nomor 23 Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah & SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekenomian Rakyat Syariah.
2. SAK ETAP Bab 28 Tentang Pengungkapan Pihak - pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

6. ***Loan to Deposit Ratio (LDR)***

Berdasarkan hasil evaluasi terkait Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR bahwa :

Kondisi :
BPR sebagaimana kondisinya saat ini per 31 Desember 2024 posisi LDR BPR berada pada 91,62%, dimana apabila LDR kurang dari sama dengan 94,75% maka BPR dikategorikan sehat.

Kriteria :
1. POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.
2. SEOJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.

7. **Perbandingan Jumlah Kredit Bermasalah Terhadap Total Kredit Yang Diberikan**

Berdasarkan hasil evaluasi terkait Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan bahwa :

Kondisi :
BPR sebagaimana kondisinya saat ini per 31 Desember 2024 posisi NPL Gross BPR berada pada 4,30% dan NPL Nett berada pada 2,52%, dimana apabila NPL Gross setinggi – tingginya sebesar 5% berdasarkan praktik terbaiknya.

Kriteria :
1. POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.

2. SEOJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.

Saran :
NPL telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun manajemen tetap mengevaluasi dan memantau secara berkala terkait NPL ini agar senantiasa dapat mempertahankan nilai NPL kurang dari 5%.

8. **Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Berdasarkan hasil evaluasi terkait Return on Asset (ROA) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) bahwa :

Kondisi :
BPR sebagaimana kondisinya saat ini per 31 Desember 2024 posisi ROA berada pada 1,31% dan BOPO berada pada 89,86%. ROA BPR termasuk kategori peringkat 3 yaitu memenuhi kriteria $1\% \leq ROA \geq 1{,}5\%$. BOPO BPR termasuk kategori peringkat 2 yaitu memenuhi kriteria $85\% < BOPO \leq 90\%$.
BPR yang termasuk dalam Peringkat 2 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai;
b. Sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan;
c. Komponen yang mendukung core earnings cukup stabil; dan/atau
d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang tinggi.

Rentabilitas cukup memadai, laba memenuhi target, meskipun terdapat tekanan terhadap kinerja laba yang dapat menyebabkan penurunan laba namun cukup mendukung pertumbuhan permodalan BPR. BPR yang termasuk dalam Peringkat 3 ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:
a. Kinerja BPR dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai;
b. Sumber utama rentabilitas berasal dari core earnings cukup dominan namun terdapat pengaruh yang cukup besar dari non core earnings;
c. Komponen yang mendukung core earnings cukup stabil; dan/atau
d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan cukup baik.

Kriteria :
1. POJK Nomor 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.
2. SEOJK Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah.

Saran :
Sebaiknya manajemen perlu melakukan langkah efisiensi terkait struktur biaya dan meningkatkan potensi pendapatan, dan manajemen perlu mempertimbangkan dan memberi perhatian pada penurunan ROA ataupun peningkatan BOPO secara jangka panjang yang dapat menimbulkan potensi penurunan pemenuhan modal.

9. **Keandalan Sistem Informasi**

Berdasarkan hasil evaluasi terkait Keandalan Sistem Informasi BPR bahwa :

Kondisi :
Keandalan sistem informasi BPR dinilai mencukupi karena memenuhi 4 (empat) prinsip sistem yaitu sistem tersebut dapat dioperasikan, sistem memiliki keamanan yang baik, sistem dapat dipelihara/dapat diubah, serta pemrosesan sistem bersifat lengkap, akurat, tepat waktu & otorisasi.

10. **Hal – Hal Terkait Standar Akuntansi Keuangan ETAP**
Proses pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan telah sepenuhnya berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), namun terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian atas laporan keuangan yang disajikan.

Kondisi :
Terdapat hal yang membutuhkan penyesuaian atas saldo sebagaimana terlampir dalam PAJE (*Proposed Adjusment Entries*) di lampiran.

Kriteria :
1. SAK ETAP.

Surat komentar ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi kepada manajemen dan bukan untuk disajikan kepada pihak-pihak diluar perusahaan, untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi serta tes yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

Demikian *management letter* ini kami sampaikan, dan atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
KAP Dra. YATI RUHIYATI

Dra. Yati Ruhiyati, CA., CPA

Surat Izin Akuntan Publik : AP.0423

PAJE (Proposed Adjusment Entries) PERUMDA BPR KUNINGAN 2024					
Kode	No Ref	Keterangan	Dr		Cr
J1	14801	PPAP - Kredit Yang Diberikan	680.321		
	42852	Pemulihan PPAP Kredit Yang Diberikan			680.321
		(Penyesuaian Nilai PPAP KYD Kol I Cabang 7)			
J2	51861	Beban PPAP KYD	4.874.262		
	14801	PPAP - Kredit Yang Diberikan			4.874.262
		(Penyesuaian Nilai PPAP KYD Kol II Cabang 2)			
J3	14801	PPAP - Kredit Yang Diberikan	557.385		
	42852	Pemulihan PPAP Kredit Yang Diberikan			557.385
		(Penyesuaian Nilai PPAP KYD Kol II Cabang 7)			
J4	14801	PPAP - Kredit Yang Diberikan	3.735.569		
	42852	Pemulihan PPAP Kredit Yang Diberikan			3.735.569
		(Penyesuaian Nilai PPAP KYD Kol III Cabang 1)			
J5	14802	PPAP - Restrukturisasi Kredit	66.490		
	51801	Beban Kerugian Restrukturisasi			66.490
		(Penyesuaian Nilai PPAP Restrukturisasi Kredit Cabang 6)			
J6	52705	Beban Penyusutan Inv Gol I	360.928		
	16403	Akumulasi Penyusutan Inv Gol I			360.928
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Inv Gol I Cabang 1)			
J7	16403	Akumulasi Penyusutan Inv Gol I	73.096		
	52705	Beban Penyusutan Inv Gol I	2.108.574		
	54719	Beban Non Operasional Lainnya			2.181.670
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Inv Gol I Cabang 3)			
J8	54719	Beban Non Operasional Lainnya	1.090.831		
	16404	Akumulasi Penyusutan Inv Gol II			38.960
	52706	Beban Penyusutan Inv Gol II			1.051.871
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Inv Gol II Cabang 3)			
J9	54719	Beban Non Operasional Lainnya	23.829.140		
	52705	Beban Penyusutan Inv Gol I			23.829.140
		(Reclass Beban Penyusutan Inv Gol I Cabang 4)			
J10	16401	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Roda 4	1		
	52703	Beban Penyusutan Inv Kendaraan Roda 4			1
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan Roda 4 Cabang 4)			
J11	52706	Beban Penyusutan Inv Gol II	11.431.300		
	54719	Beban Non Operasional Lainnya			11.431.300
		(Reclass Beban Penyusutan Inv Gol II Cabang 4)			
J12	54719	Beban Non Operasional Lainnya	3.959.476		
	52701	Beban Penyusutan Inv Gol IV			3.959.476
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Inv Gol IV Cabang 4)			
J13	16204	Inventaris Kantor Gol II	3.500.000		
	16203	Inventaris Kantor Gol I			3.500.000
		(Reclass Invetaris Gol II ke Inventaris Gol I Cabang 5)			
J14	54719	Beban Non Operasional Lainnya	2		
	16401	Akumulasi Penyusutan Kendaraan Roda 4			2
		(Penyesuaian Akum Penyusutan Kendaraan Roda 4 Cabang 5)			

PAJE (Proposed Adjusment Entries) PERUMDA BPR KUNINGAN 2024					
Kode	No Ref	Keterangan	Dr		Cr
J15	54719	Beban Non Operasional Lainnya	8.688.964		
	52701	Beban Penyusutan Inv Gol IV			8.688.964
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Inv Gol IV Cabang 6)			
J16	16404	Akumulasi Penyusutan Inv Gol II	218.707		
	54719	Beban Non Operasional Lainnya	29		
	52706	Beban Penyusutan Inv Gol II			218.737
		(Penyesuaian Beban Penyusutan Inv Gol II Cabang 6)			
J17	54719	Beban Non Operasional Lainnya	2.210.985		
	52706	Beban Penyusutan Inv Gol II			2.210.985
		(Reclass Beban Penyusutan Inv Gol II Cabang 7)			
J18	54719	Beban Non Operasional Lainnya	1.562.355		
	52701	Beban Penyusutan Inv Gol IV			1.562.355
		(Reclass Beban Penyusutan Inv Gol IV Cabang 7)			
J19	24101	KIK Pensiun	58.597.110		
	52303	Beban Tunjangan Pensiun			58.597.110
		(Penyesuaian KIK Pensiun)			
J20	18201	Pajak Dibayar Dimuka	6.617.909		
	53209	Beban Pajak Lainnya			6.617.909
		(Reclass Pembayaran PPh Pasal 25)			
J21	51751	Beban Koreksi Pendapatan Bunga	2.788.528		
	14701	Pendapatan Bunga Ditangguhkan			2.380.890
	14702	Pendapatan Bunga Ditangguhkan - Kapitalis			407.638
		(Penyesuaian Pendapatan Bunga Ditangguhkan Cab 6)			
J22	56001	Beban Taksiran Pajak Penghasilan Badan	1.095.967.127		
	18201	Pajak Dibayar Dimuka			396.326.059
	21901	Pajak Badan Belum Dibayar / PPh Pasal 29			699.641.068
		(Penyesuaian Beban Taksiran Pajak)			
JUMLAH			1.232.919.090		1.232.919.090